



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB 2	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA.....	12
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda.....	12
2.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas.....	16
2.1.2	Tugas pokok dan fungsi Sekertaris	17
2.1.3	Tugas dan Fungsi Kepala Bidang	21
2.2	Sumber Daya Bappeda	40
2.2.1	Kondisi Kepegawaian	40
2.2.2	Kondisi Sarana Prasarana.....	48
2.3	Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Magelang	52
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda.....	58
BAB 3	ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	60
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Bappeda.....	60
3.2	Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang ...	64
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	74
3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas	75
3.3.2	Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.....	78
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	80
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	80
3.4.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	104
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	105
BAB 4	TUJUAN DAN SASARAN	107
4.1	Tujuan Bappeda Kota Magelang.....	107
4.2	Sasaran Bappeda Kota Magelang.....	107
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	110
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	112
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	141

BAB 8	PENUTUP.....	144
LAMPIRAN A :	POHON KINERJA BAPPEDA KOTA MAGELANG	
LAMPIRAN B :	CASCADING BAPPEDA KOTA MAGELANG	
LAMPIRAN C :	DIFINISI OPERASIONAL	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	41
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan.....	42
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam 5 Tahun Ke Depan	46
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat	46
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 2.6	Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020	48
Tabel 2.7	Daftar Asset yang dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang.....	48
Tabel 2.8	Daftar Kebutuhan Barang 5 tahun kedepan Bappeda Kota Magelang ..	50
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020	53
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2020	57
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	63
Tabel 3.2	Makna Visi Kota Magelang 2021-2026	64
Tabel 3.3	Telaahan Visi-Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, Permasalahan dan Faktor Penanganannya yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	73
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	76
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	79
Tabel 3.6	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Arahkan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2016	81
Tabel 3.7	Arahkan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026	83
Tabel 3.8	Arahkan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026	88
Tabel 3.9	Arahkan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026	92
Tabel 3.10	Arahkan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal Kota Magelang 2022-2026	97
Tabel 3.11	Arahkan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal Kota Magelang 2022-2026	100

Tabel 3.12	Indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan RTRW Kota Magelang	101
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 -2026.....	108
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	113
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2	Skema Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kota Magelang Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	15
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin	42
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan	45
Gambar 3.1	Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi	69
Gambar 3.2	Program Unggulan Kepala Daerah.....	70
Gambar 3.3	Cascading Misi 3	71
Gambar 3.4	Skema Strategi Pencapaian Misi 3.....	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menjadi pedoman untuk mempermudah pencapaian tujuan di masa yang akan datang dengan membuat strategi serta tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Daerah menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan daerah. Dalam kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja). Adapun Renstra dan Renja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Bappeda Kota Magelang tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Penyusunan Renstra disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

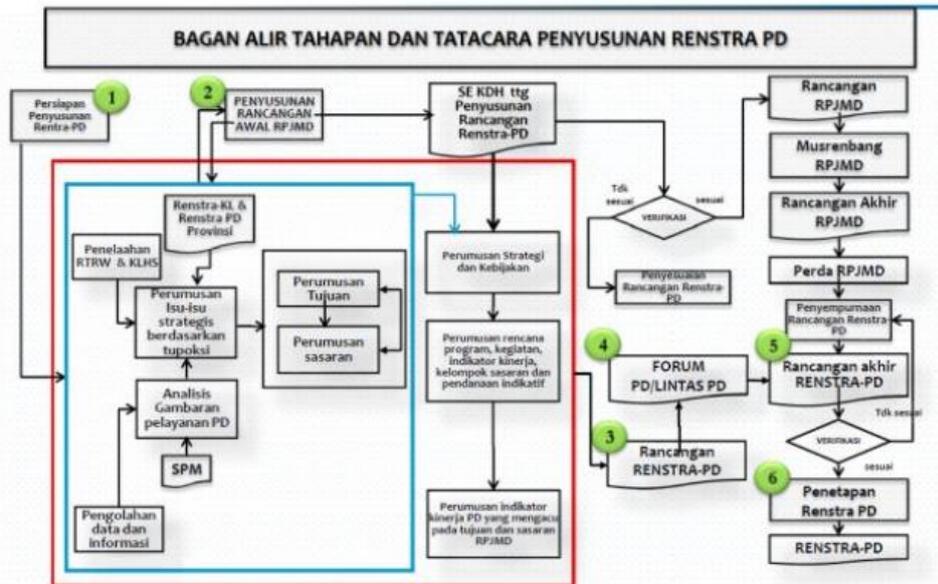
Pemerintah Kota Magelang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 yang dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Guna mencapai visi jangka panjang Kota Magelang, maka RPJPD Kota Magelang dibagi kedalam 4 tahap

pembangunan, dimana setiap tahap mempunyai tema pembangunan yang melandasi penyusunan rencana pembangunan sesuai waktu pentahapannya. RPJM-D 2005-2010 yang merupakan tahap I RPJP-D 2005-2025 dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, RPJM-D 2010-2015 sebagai pelaksanaan Tahap-II RPJP-D disusun pada tahun 2010-2011 dan dipayungi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Sementara Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ke tiga dipanyungi dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 tahun 2016 tentang RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Renstra yang berpedoman pada RPJM-D. Materi yang dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Perangkat Daerah juga dicantumkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJM-D. Hal itu sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mendukung atau memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJM-D.

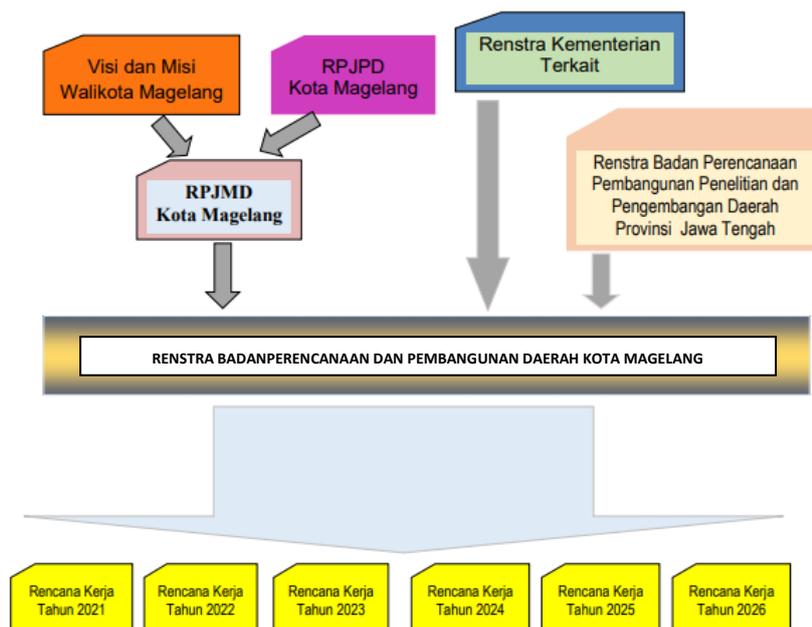
Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Sptember 2021, maka RENSTRA OPD harus segera disusun dan harus ditetapkan paling lambat 30 hari setelah pnetapan Perda tentang RPJMD. RENSTRA merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Tahapan dan keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan lainnya diatur dalam pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan
- penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1.1
Skema Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI 2020 - 2024, Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023, dan RPJMD Kota Magelang 2021-2026. Keterkaitan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Skema Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kota Magelang Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Magelang tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah agar dokumen ini dapat menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kota Magelang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Selain itu, dokumen Renstra Bappeda ini harus mampu menjadi pijakan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu berdasarkan prioritas pembangunan Kota Magelang dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Magelang sehingga keterkaitan, kesesuaian dan konsistensi dapat terjamin antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama lima tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian penting dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan pelayanan dan faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memberi gambaran faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Memberikan gambaran terkait isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. Pada bagian ini direview kembali faktor - faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: a). gambaran pelayanan Perangkat Daerah; b). sasaran jangka menengah pada dokumen Renstra K/L; c). sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/ kota; d). implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan e).implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat konklusi akhir dan penegasan tentang dokumen Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Bappeda Kota Magelang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bappeda Kota Magelang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkair dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bappeda Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Bappeda dibantu oleh:

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
- (2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- (3) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

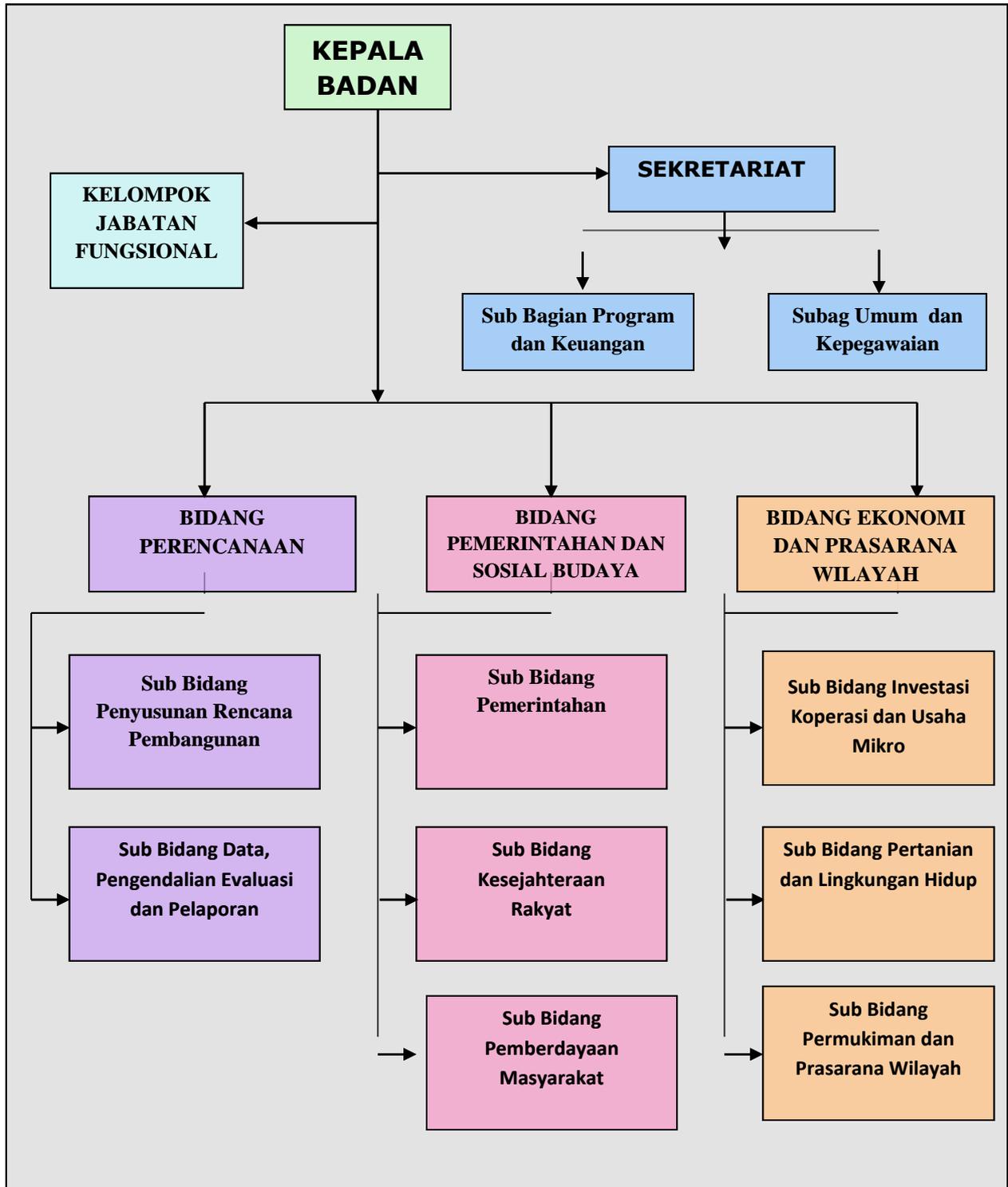
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perwal Nomor 47 Tahun 2016

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.

- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
- g. Menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga dan Standar Biaya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris

Nama Jabatan : Sekretaris

Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program , pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
- k. Melaksanakan pengkoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekre-tariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang

3. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN
- Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan

Tugas : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
5. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
mempu-nyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, peng-koordinasian,

penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi - Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

- g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
- i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
- j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.

- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
- Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subsid Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis terkait dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subid Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

- f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
 - j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
 - n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
10. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
 Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempu-nyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangu-nan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan,

ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

- d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan-pembangunan pada urusan pendidikan,

kebudayaan, perpustakaan, kearsipan,
kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.

- i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mem-punyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
- c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
- f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) harus dilandasi oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis pada saat ini dan masa yang akan datang. Pemerintah Daerah adalah pengemban amanah kebijakan publik yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintahan pada masa mendatang harus mencerminkan pemerintahan yang cerdas dan mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan apabila aparturnya cerdas.

Sumber daya organisasi merupakan modal dasar bagi suatu organisasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan perencanaan

organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dari sumber daya organisasi ini adalah Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh sumber daya pegawai yang berada di dalam organisasi tersebut untuk bersama - sama berpartisipasi dan memberikan kontribusinya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing - masing. Perencanaan Sumber Daya Manusia merupakan satu bagian di dalam penyusunan Renstra Bappeda ini, dimana didalamnya terdapat perencanaan kebutuhan (baik kualitas maupun kuantitas), langkah dan strategi, pendidikan dan pelatihan karyawan serta kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas karyawan yang akan di tempuh dalam lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan September 2021 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut :

❖ Menurut Jenis Kelamin :

Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi yang hampir sama antara pegawai dengan jenis kelamin perempuan dan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki. Perbandingannya 44.44 % pegawai perempuan dan 55.56 % pegawai laki-laki sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	15	55.56 %
2	Perempuan	12	44.44 %
		27	100.00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2021, data diolah

Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan Bappeda belum mencukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin

Jumlah karyawan Bappeda pada tahun 2021 apabila dibandingkan pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah. Pada tahun 2017 total karyawan Bappeda sebanyak 38 orang. Seiring perjalanan waktu terdapat pengurangan jumlah karyawan yang disebabkan adanya mutasi karyawan dan adanya beberapa karyawan yang memasuki purna tugas.

❖ Menurut Jabatan :

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II, III dan IV dan jabatan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Ket
----	---------	--------	-----

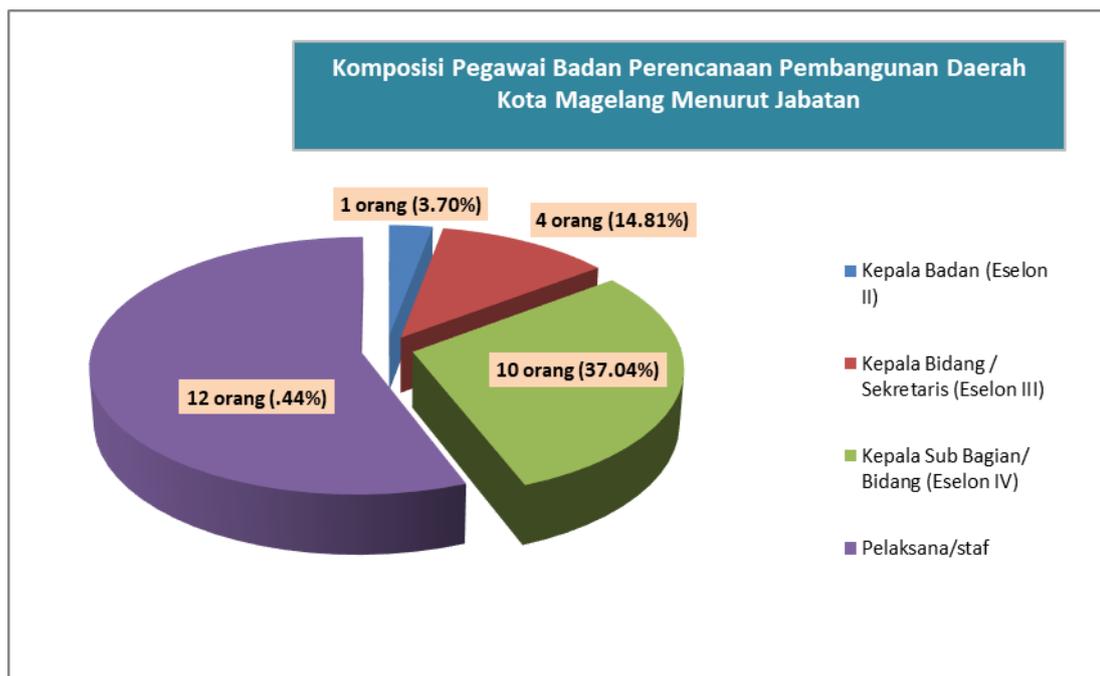
		Existing	Kebutuhan	
1	Kepala	1	1	
2	Sekretaris	1	1	
3	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	1	1	
	Bendahara	1	1	
	Penyusun Laporan Keuangan	-	1	
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-	1	
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	
4	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	1	
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	1	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	1	
	Pengadministrasi Umum	1	1	
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	-	1	
5	Ka Bidang Perencanaan	1	1	
6	Ka Sub Bid Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	1	1	
	Analisis Perencanaan	1	1	
	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan	1	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
7	Ka Sub Bid Penyusunan Rencana Pembangunan	1	1	
	Perencana Muda	-	1	
	Analisis Perencanaan	-	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial	1	1	
9	Ka Sub Bid Pemerintahan	1	1	
	Analisis Perencanaan	1	1	
	Pengolah Data	-	1	

	Pengadministrasi Perencanaan	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
10	Ka Sub Bid Pemberdayaan Masyarakat	1	1	
	Perencana Muda	1	1	
	Analisis Perencanaan	1	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
11	Ka Sub Bid Kesejahteraan Rakyat	1	1	
	Perencana Muda	-	1	
	Analisis Perencanaan	-	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
12	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana	1	1	
13	Ka Sub Bid Pertanian dan Lingkungan	1	1	
	Perencana Muda	1	1	
	Analisis Perencanaan	-	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	1	1	
14	Ka Sub Bid Permukiman dan Prasarana	1	1	
	Perencana Muda	-	1	
	Analisis Perencanaan	1	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
15	Ka Sub Bid Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro	1	1	
	Analisis Perencanaan	-	1	
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	1	
	Pengolah Data	-	1	
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1	
	Pengadministrasi Umum	-	1	
JUMLAH		27	62	35

Kondisi di atas menggambarkan jumlah struktural sudah terpenuhi. Namun Jumlah pelaksana atau dalam jabatan fungsional lainnya secara umum masih belum mencapai angka ideal. Secara ideal jumlah pelaksana

berbanding dengan jumlah Ka Sub Bagian/ Bidang rata –rata adalah 5 (lima) personil berbanding 1 (satu) kasubid/kasubbag. Sehingga apabila dalam tahun – tahun kedepan jumlah tersebut dapat terpenuhi secara ideal maka tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dapat lebih maksimal.

Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Jabatan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan

Jumlah pelaksana/staf/fungsional yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir ini mengakibatkan jumlah pegawai belum bisa dikatakan mencapai jumlah ideal yang di butuhkan sesuai dengan beban kerja yang harus di pikul oleh Bappeda, mengingat pelaksana/staf/fungsional merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Kebanyakan pelaksana/staf/fungsional yang ada pada tiap bidang masih melakukan berbagai macam duplikasi pekerjaan yaitu pekerjaan yang tugas pokok pekerjaan bidang, melakukan administrasi keuangan, melakukan administrasi kearsipan bidang serta pekerjaan - pekerjaan lain.

Adapun jumlah pegawai yang akan memasuki masa purna tugas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam 5 Tahun Ke Depan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan III	1	2022

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, Tahun 2021 data diolah

Berdasarkan data jumlah pegawai yang akan memasuki purna tugas, maka perlu disusun strategi agar tugas yang diemban Bappeda dapat dilaksanakan dengan baik.

❖ Menurut Golongan/ Pangkat :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1	Golongan I	-	0 %
2	Golongan II	2	7.40 %
3	Golongan III	20	74.08 %
4	Golongan IV	5	18.52 %
	Jumlah	27	100%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, September 2021, data diolah

❖ Menurut Tingkat Pendidikan :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagaimana tabel 2.5:

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	7	25.93	6	22.23	13	48.16
2	Sarjana/ S1	5	18.51	5	18.51	10	37.02
3	Sarjana Muda/ D3	1	3.72	0	0	1	3.72
4	Sekolah Menengah Atas	2	7.40	1	3.70	3	11.10
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0.00
6	Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0.00
		15	55.56	12	44.44	27	100.00

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, bulan September tahun 2021 data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.5 di atas, tingkat pendidikan pegawai Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan Pasca Sarjana/S1 sebesar 48.16 % terdiri dari 7 karyawan laki-laki dan 6 karyawan perempuan. Selanjutnya pada peringkat ke dua disusul dengan karyawan berpendidikan Sarjana/S2 sebesar 37.02% terdiri dari 5 karyawan laki-laki dan 5 karyawan perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai Bappeda Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi ,misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran organisasi.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompetensinya (*the right man on the right*

place) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi OPD.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan.

Aset yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu aset intrakompatibel dan aset ekstrakompatibel sebagaimana nampak pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Total Aset Intrakompatibel	
	a. Aset Intrakompatibel	Rp. 6.125.505.284,00
	b. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset lain-lain)	Rp. 887.596.935,00
	c. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset tidak berujud)	Rp. 640.680.850,00
2	Aset Ekstrakompatibel	
	a. Aset Ekstakompatibel	Rp. 887.596.935, 00
	b. Aset Lainnya Ekstrakompatibel	Rp. 142.562.850, 00

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2020

Sedangkan apabila dilihat dari jumlah asetnya, maka dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Daftar Aset yang dimiliki oleh Bappeda Kota Magelang

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	Alat-Alat Angkut				
1	Roda 4	4	1	1	6
2	Roda 2	10	7	6	23
3	Gerobak sampah	1	0	0	1
	Alat-Alat Ukur				
1	GPS	0	1	0	1
2	Alat Ukur Meter Lase Disto X310	1	0	0	1
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Alat Kantor-Mesin Tik	0	0	1	1
2	Alat Kantor	23	17	12	52
3	Alat-Alat Kantor Lainnya	2	15	14	31
4	Bangunan Gedung	8	0	0	8
5	Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	11	0	0	11
	Alat Rumah Tangga				
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur	79	28	21	128
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	16	4	8	28
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	2	0	0	2
4	Alat Rumah Tangga Lainnya	9	1	0	10
	Berita Acara Koreksi Mapping Aset Tahun 2014				
1	Reklasifikasi dari Alat Studio dan Komunikasi	8	6	5	19
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4	1	1	6
	Peralatan Komputer				
1	Personal Komputer	42	6	10	58
2	Peralatan Personal Komputer	54	9	16	79
3	Peralatan Jaringan	3	0	0	3
	Meja Kursi Pejabat				
1	Meja Kerja Pejabat	8	1	1	10
2	Kursi Kerja Pejabat	18	7	8	33
	Alat Studio dan Komunikasi				
1	Alat Studio-Cetak	0	1	0	1
2	Alat Komunikasi dan Telepon	1	0	1	2

No	Jenis Barang	Kondisi Barang			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
	Alat kedokteran				
1	Alat kedokteran Umum	1	0	0	1
	Alat Keamanan				
1	Persenjataan Non Senjata Api	7	0	1	8
	Gedung dan Bangunan Gedung				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1	0	0	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Hibah dari DKK	3	0	0	3
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Gudang	2	0	0	2
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi	4	0	0	4
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	0	0	1
	Jalan, Irigasi, Jaringan Bangunan Air/Irigasi				
1	Bangunan Pembuangan Air Kotor	1	0	0	1

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2020

Tabel 2.8
Daftar Kebutuhan Barang 5 tahun kedepan Bappeda Kota Magelang

No	Jenis Barang	Jumlah kebutuhan barang					Jumlah	Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Alat-Alat Angkut							
1	Roda 4			3	2		5	Penggantian 4 unit (masa ekonomis berakhir) dan penambahan 1 unit (penambahan bidang litbang)
2	Roda 2			3	2	4	9	Penggantian dan penambahan
3	Gerobak sampah	1					1	penambahan
	Alat-Alat Kantor dan							

No	Jenis Barang	Jumlah kebutuhan barang					Jumlah	Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Rumah Tangga							
2	Alat Kantor		3	3	3	3	12	Penggantian
3	Alat-Alat Kantor Lainnya		5	3	3	3	14	Penggantian
	Alat Rumah Tangga							
1	Alat Rumah Tangga Mebeleur		5	5	6	6	22	Penggantian
2	Alat Rumah Tangga Pembersih	1					1	Penggantian
3	Alat Rumah Tangga-Alat Dapur		25	25	25	25	100	Penambahan dan penggantian
4	Alat Rumah Tangga Lainnya		712 M2				712 M2	Penambahan dan penggantian
1	Alat Studio dan Komunikasi		1	1			2	Pengantian
2	Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran		1				1	Penggantian
	Peralatan Komputer							
1	Personal Komputer	1	10	10	5	4	30	Penambahan dan penggantian
2	Peralatan Personal Komputer		6	5	5		16	Penggantian
	Meja Kursi Pejabat							
1	Meja Kerja Pejabat		5				5	Penambahan dan penggantian
2	Kursi Kerja Pejabat		6	6	6		18	Penambahan dan penggantian
	Alat Studio dan Komunikasi							
1	Alat Studio-Cetak		1				1	Penambahan dan penggantian
2	Alat Komunikasi dan Telepon		3	2			2	Penambahan dan penggantian
	Alat							

No	Jenis Barang	Jumlah kebutuhan barang					Jumlah	Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026		
	Keamanan							
1	Persenjataan Non Senjata Api			5			5	Penambahan cctv

Secara ketersediaan aset, sebagian besar kebutuhan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa aset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasikan lagi (terutama aset-aset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Aset – aset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan aset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Magelang

Kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang yang utama dalam berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu perencanaan pembangunan, yang sekaligus menjadi *core business*. Untuk mengetahui kinerja Bappeda Kota Magelang, dapat dilihat dari capaian kinerja pelayanan dan capaian kinerja keuangan. Adapun kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang pada periode RPJMD yang lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target NSPK	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi capaian Tahun ke					Rasio capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	-	-	-	88	90	93	95	98	89	90,41	74,69	72,29	59,04	101,14	100,46	80,31	76,09	53,06
	b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	60	60	70	80	90	93,5	94,75	97,81	99,71	96,25	155,83	157,92	139,73	124,64	106,67
2	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	-	-	-	55	60	62	68	68	60	70,19	80	81	80,34	109,09	116,98	129,03	119,12	118,15
	b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	-	-	-	51,72	58,62	65,52	75,86	82,76	51,72	58,62	65,52	65,52	86,21	100,00	100,00	100,00	86,37	104,17
3	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	-	-	-	47,5	51,25	57,5	62,5	66,75	na	58,17	74,95	75	59,1	na	113,50	130,35	119,92	88,54
4	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	-	-	-	100	100	100	100	100	na	100	100	100	99,36	na	100,00	100,00	100,00	99,36
5	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	-	-	-	70	70	75	75	80	na	73,94	76,8	76,8	93,33	na	105,63	102,40	102,40	116,66

Sumber: LKjIP Bappeda Tahun 2016-2020

Pada tabel 2.9 menunjukkan kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang tahun 2016-2020. Kinerja pelayanan Bappeda diukur dari ketercapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021, terdapat 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran. Adapun penjelasan dari capaian indikator kinerja Bappeda adalah sebagai berikut:

- Capaian untuk sasaran pertama dapat dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu:
 - a. Persentase Capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan tren menurun dari tahun 2019. Realisasi kinerja pada tahun **2020** realisasi agak menurun ke angka **59,04%** (*Capaian tahun 2020 dari **83** indikator sasaran yang di amanatkan terdapat **49** indkator yang tercapai*) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar **98%**. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **53.06%**. Hal ini terjadi karena adanya refocusing penganggaran akibat adanya pandemi covid -19.
 - b. Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang. Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020. Apabila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **96,25%** dari target sebesar 90% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **106,94%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui *DataGo* Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 99,42% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 50% (Data / informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah hanya semester 2 tahun 2019 saja yang tersajikan sebagai salah satu sumber data pembangunan).

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan melalui 2 (dua) indikator, yaitu:
 - a. Indikator sasaran yang pertama yaitu Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD mengalami tren menurun sejak tahun 2019. Akan tetapi, walaupun mengalami tren yang menurun, capaian indikator ini masih di atas yang ditargetkan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 118,14%.
 - b. Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran kedua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% pada tahun 2016. Capaian tahun 2017 jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun tersebut sebanyak **17 OPD (58.62%)**. Capaian pada tahun 2018 sebesar 65,52%. Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2019 sebanyak **19 OPD** dan ini masih sama dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 25 OPD. Apabila diprosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **86,21%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini sudah melebihi target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar **82,76%** dengan kata lain mencapai target yang telah di tetapkan di awal perencanaan tahun 2019 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,17%. Hal ini menunjukkan upaya OPD untuk menggandeng mitra agar memiliki andil dalam pembangunan daerah.
- Sasaran Strategis yang ketiga yaitu mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikas mempunyai satu indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Tren pada indikator ini mengalami penurunan sejak tahun 2019. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh: (a) persentase usulan program kegiatan hasil musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD, (b) persentase pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD, (c) persentase usulan konsultasi public yang diakomodir dalam Renja OPD serta (d) persentase usulan masyarakat di e-Aspirasi yang terakomodir dalam Renja PD. Tren menurun dari capaian indikator ini disebabkan

kemampuan keuangan daerah yang menurun pada tahun 2019 dan diperparah dengan pandemic Covid-19 pada tahun 2020.

- Sasaran strategis yang keempat adalah “Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan”. Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Capaian sasaran ini dari target sebesar **100%** tercapai sebesar **99,36%**.
- sasaran yang kelima yaitu “ Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas” mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Apabila melihat realisasi kinerja indikator mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 direncanakan target kinerja sebesar 80%. Adapun capaian realisasinya sebesar 93,33% sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar 116,67%.

Selain dari kinerja pelayanan, maka dapat pula dilihat dari kinerja keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tidak Langsung	2.370.618	3.296.936	3.088.155	3.512.947	3.607.795	2.186.847,368	2.848.310,903	2.958.693,701	3.340.395,247	3.173.127,578	92,25	86,39	95,81	95,09	87,95	12.30	10.50
2	Belanja Langsung	6.530.182	6.883.309	6.334.036	7.786.618	2.689.761	5.941.725,701	6.229.831,710	5.915.795,332	7.100.747,337	2.585.748,042	90,99	90,51	93,40	91,19	96,13	-11.27	-10.94
	- Belanja Pegawai	1.875.659	1.837.351	1.943.128	2.469.919	872.525	1.746.984	1.739.376	1.842.115,5	2.229.955.000	838.367,500	93,14	94,67	94,80	90,28	96,09	-8.46	-8.97
	- Belanja Barang dan Jasa	4.361.071	4.229.808	3.794.408	4.901.627	1.388.850	3.911.653,701	3.821.861,710	3.525.893,832	4.456.266,337	1.322.675,542	89,69	90,36	92,92	90,91	95,24	-13.95	-13.49
	- Belanja Modal	293.452	816.150	596.500	415.072	428.386	283.088	668.594	547.786	414.526.	424,705	96,47	81,92	91,83	99,87	99,14	31	24.06
	TOTAL BTL+BTL	8.900.800	10.180.245	9.422.191	11.299.565	6.297.556	8.128.573,069	9.078.142,613	8.874.489,033	10.441.142.584	5.758.875,620	91,32	89,17	94,19	92,40	91,45	-4.35	-16.85

Sumber : Laporan Akhir Tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2016-2020

Berdasarkan tabel 2.10 di atas dapat di lihat bahwa secara alokasi penganggaran yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menunjukkan nominal yang berfluktuatif mengingat dalam beberapa tahun terakhir terjadi rasionalisasi anggaran yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Peningkatan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan alokasi perencanaan dalam rangka percepatan pencapaian target visi misi Kepala Daerah maupun pencapaian program- program prioritas yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Hal – hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Apabila kita perhatikan dari tabel alokasi dan realisasi belanja di atas untuk realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan disesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bappeda Kota Magelang merupakan *koordinator* Pemerintah Kota Magelang dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perencana memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga perlu memperhatikan dinamika, prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral dengan melibatkan *stakeholders*.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangatlah bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap lingkungan oleh Bappeda Kota Magelang dengan memperhatikan dinamika, tantangan serta peluang baik internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Magelang dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait perencanaan daerah. Dinamika regulasi yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan perangkat daerah lainnya.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan diharapkan akan berpengaruh pada kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat ini diberikan ruang dalam penyampaian serta pengakomodirannya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan tepat sasaran.

Beberapa kondisi yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja OPD yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
3. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis Bappeda Kota Magelang merupakan hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis di mulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu di kenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Bappeda dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Magelang. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Renstra Bappenas, RTRWK serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Bappeda

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Permasalahan utama dalam proses perencanaan adalah **Kurangnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** yang ditandai dengan capaian kinerja indikator Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5 dan tingkat ketercapaian target sasaran daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

A. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Hal tersebut ditandai dengan persentase kinerja nilai sakiip PD komponen perencanaan dan jumlah prosentase ketercapaian sasaran daerah. Ini disebabkan oleh :

1. Kurangnya kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah

Saat ini masih ditemui inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh:

a. Keterbatasan data dukung perencanaan

Keterbatasan data dukung dimaksudkan tidak hanya data yang bersifat numerical saja, namun juga termasuk kajian-kajian strategis. Dalam hal penyediaan data numerical, permasalahan disebabkan oleh pengumpulan data yang kurang tepat waktu dan jumlah data dukung yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan, serta kajian strategis yang masih diperlukan dalam perumusan perencanaan.

Keterbatasan data dukung diakibatkan oleh:

- 1) Masih terjadinya keterlambatan data rancangan dokumen perencanaan pembangunan
- 2) Terbatasnya gambaran permasalahan dan issue strategis
- 3) Kurangnya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah
- 4) Terbatasnya ketersediaan data profil daerah

Peran data sangat penting dalam menyusun suatu perencanaan. Oleh karenanya ketersediaan data yang tepat dan up to date akan meningkatkan kualitas sebuah dokumen perencanaan. Huruf a sampai d menunjukkan bahwa permasalahan data masih menjadi kendala dalam perumusan perencanaan yang berkualitas dalam pembangunan daerah di Kota Magelang.

2. Terbatasnya usulan masyarakat yang diakomodir

Keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karenanya peran serta masyarakat sejak penyusunan rencana pembangunan sangatlah penting. Namun demikian sistem dan mekanisme yang ada belum memberikan ruang yang luas untuk dapat menangkap usulan masyarakat yang sedemikian banyak. Hal tersebut terjadi karena:

a. **keterbatasan keterlibatan elemen pembangunan.**

Elemen pembangunan terdiri dari unsur pentahelix : Pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha, Akademisi dan Media Massa. Bila dilihat dari 5 unsur tersebut, maka semua unsur sudah terwakili, namun demikian masih sangat terbatas jumlah keterlibatannya. Keterbatasan ini terjadi karena:

- 1) Kurangnya fasilitasi terhadap masukan masyarakat
- 2) Kurangnya kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan rencana pembangunan daerah

Kurangnya fasilitas dan kurangnya kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan rencana pembangunan daerah merupakan masalah yang saling berkaitan. Terbatasnya volume penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan dan terbatasnya media penyaluran aspirasi mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan.

- 3) Kurangnya tanggapan OPD terhadap usulan masyarakat

Hal ini terjadi karena sistem dan mekanisme usulan yang belum terkelola dengan baik, sehingga respon dari OPD belum bisa dimonitoring dengan baik oleh BAPPEDA sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah.

B. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah

Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah disebabkan karena hasil pengendalian dan evaluasi yang belum terpantau, yang disebabkan oleh:

1. Pengendalian dan evaluasi yang belum menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti OPD. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terjadi karena:
 - 1) Belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi
Aplikasi yang dimaksudkan meliputi hasil rekomendasi, penyampaian ke OPD hingga laporan tindak lanjut yang dilaksanakan OPD terhadap rekomendasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dapat diringkas seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan	1. Terbatasnya usulan masyarakat yang terakomodir 2. Kurangnya kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
		2. Belum efektifnya fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Pengendalian dan evaluasi belum menghasilkan rekomendasi untuk ditindak lanjuti OPD

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Magelang

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi misi walikota dan wakil walikota magelang ditujukan untuk memahami arah pembangunan Kota Magelang yang akan dilaksanakan selama periode 2021-2026. Penelaahan ini dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kota Magelang yang dapat berpengaruh pada pencapaian visi misi kepala daerah.

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**Magelang Maju, Sehat dan Bahagia**”. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia. Makna visi tertuang dalam table 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2
Makna Visi Kota Magelang 2021-2026

NO	UNSUR VISI	PENJELASAN
1.	Magelang	Magelang adalah satu wilayah di bawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,54 km ² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
2.	Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
3.	Sehat	Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam

		<p>keadaan yang baik.</p> <p>Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.</p> <p>Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p>
4.	Bahagia	<p>Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya.</p> <p>Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.</p>

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam

mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini,

menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (*human intelligence*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan

menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona,

namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewedahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalannya pertukaran informasi secara masal.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewedahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

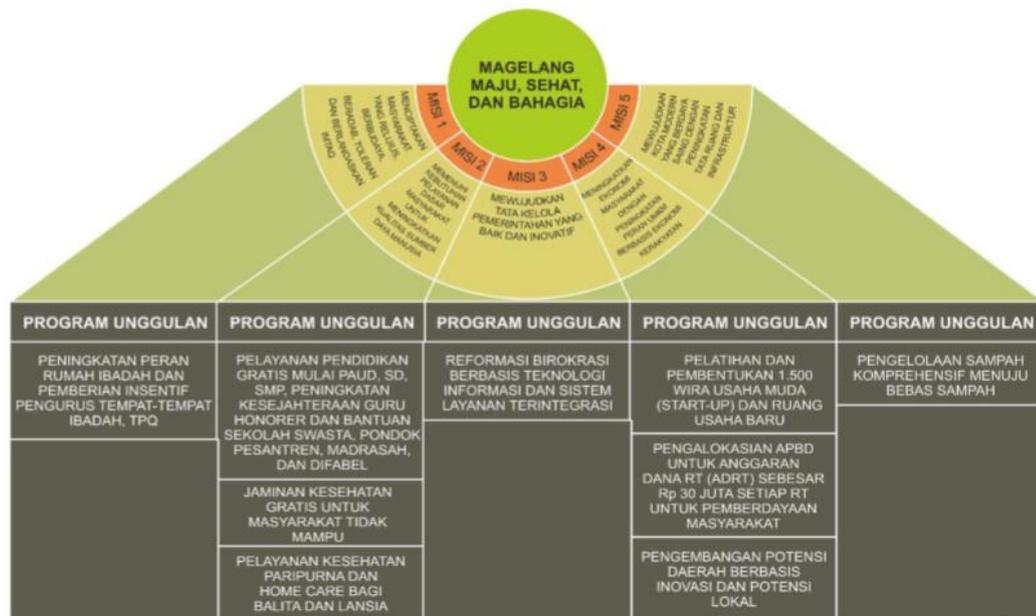
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi terdiri dari beberapa komponen visi. Berikut disampaikan keterkaitan visi, komponen visi dan misi sebagaimana tersaji pada gambar 3.1.



Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Gambar 3.1
Penterjemahan Komponen Visi kedalam Misi

Untuk mencapai Visi Misi tersebut, maka penjabaran operasional ditentukan ke dalam 9 (sembilan) Program Unggulan sebagaimana tersaji pada gambar 3.2 berikut:



Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Gambar 3.2
Program Unggulan Kepala Daerah

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2021-2026 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan komponen visi Magelang sebagai Kota yang Maju, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi 3 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif



Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

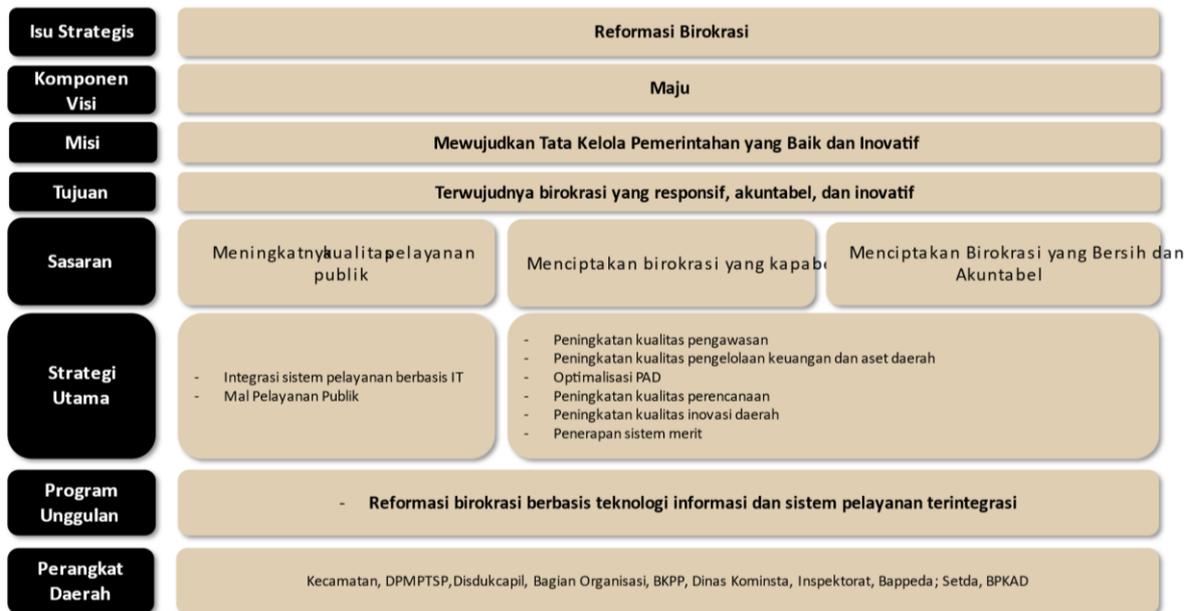
Gambar 3.3
Cascading Misi 3

Adapun uraian tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tujuan : “Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif”.

Sasaran : “Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.

Strategi : “Peningkatan Kualitas Perencanaan”.



Sumber: Dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026

Gambar 3.4
Skema Strategi Pencapaian Misi 3

Dalam pelaksanaan misi tersebut, urusan penunjang perencanaan yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang yang mana masih dijumpai berbagai permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Badan Perencanaan Kota Magelang sebagai fungsi perencanaan memiliki peran yang sangat strategis untuk mengakomodir seluruh permasalahan di kelima misi untuk dibawa ke level perencanaan di Misi 3. Hasil telaahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Visi-Misi dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota
Magelang, Permasalahan dan Faktor Penanganannya yang menjadi
kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

No	Komponen Visi	Misi	Program unggulan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
Visi : “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”							
1.	Magelang sebagai Kota yang Maju	Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Pendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Perlu terjaganya konsistensi antar dokumen baik antar dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Belum tersedianya data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akurat 3. Pengako	1. Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai. 2. Komitmen semua pegawai untuk mencapai Visi Kota Magelang. 3. Ketersediaan SDM yang dapat lebih dioptimalkan (keber

No	Komponen Visi	Misi	Program unggulan	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
						Penghambat	Pendorong
						modiran aspirasi masyarakat dan stakeholders belum maksimal. 4. Kualitas dan kompetensi SDM	adaan fungsional perencanaan).

Dari tabel 3.3. di atas maka peran BAPPEDA Kota Magelang dalam mendukung program unggulan dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

MISI
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
PROGRAM UNGGULAN
Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi
PROGRAM BADAN
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Selain permasalahan yang ada di tingkat internal dan eksternal Bappeda Kota Magelang, serta memperhatikan permasalahan serta program prioritas kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026, hal lain yang penting

perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi, sekurang-kurangnya sehubungan dengan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Magelang, selain itu aspek Tata Ruang maupun tentang program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Bappeda yang terkait dalam maksud pelaksanaan penataan ruang.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sejalan dengan itu, kata kunci dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Berkualitas:

- Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.
- Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antar pusat dan daerah, dan antardaerah.
- Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi dan tujuan sebagai berikut:

- a. Misi 1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan yang akan dicapai pada misi 1 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan 2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

b. Misi 2: Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan yang akan dicapai pada misi 2 adalah sebagai berikut:

Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dari kajian terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Maka permasalahan pelayanan Bappeda Kota Magelang beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya sebagai berikut

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen baik antar dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya koordinasi - Dokumen terkait yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan - sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen perencanaan daerah - Tersedianya regulasi perencanaan dan penganggaran - Sudah ada sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang terintegrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			(SIPD) belum dapat dimanfaatkan secara optimal	
2	terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas data dan informasi masih kurang - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya system yang menyediakan data dan informasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi - Komitmen pimpinan akan pentingnya monitoring dan evaluasi
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Perubahan kebijakan terkait perencanaan dari pusat	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamika perubahan aturan yang cepat - Kurangnya sosialisasi dan diseminasi aturan baru tentang perencanaan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang responsive terhadap perubahan kondisi terutama di masa pandemic - Kemudahan akses informasi terkait regulasi
4	Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Kualitas dan kompetensi SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas SDM perencana baik dari sisi kualitas maupun kuantitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM fungsional perencana - 48,15% SDM berlatar pendidikan S2

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, adalah: **“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**. Adapun misi yang ditetapkan

Misi 1 Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;

Misi 2 Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;

Misi 3 Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;

Misi 4 Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu “Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota”. Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu “Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”, dengan sasaran yang akan dicapai:

- Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
- Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Demikian halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda kota Magelang juga perlu menyusun daftar faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang Berdasarkan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Magelang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan • Masih kurang efektif proses perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM • Kurangnya koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM • Komitmen terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
2	Implementasi kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Magelang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Daerah;
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Daerah;
- 3) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Daerah.

Berdasarkan perwujudan pola ruang Kota Magelang, Bappeda Kota Magelang turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian beberapa indikator program baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Arahkan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2016

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
B	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota								
	a. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum								
	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe A 	Terminal Bus Tidar					APBN	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH	
	b. Pengembangan Terminal Barang								
	- Studi kelayakan sarana pergudangan dan rest area angkutan barang Kota Magelang	Terminal Barang Jalan Sukarno-Hatta					APBN	DISHUB, DPUPR, BAPPEDA, Kementerian Perhubungan	
	2. Perwujudan Sistem Jaringan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Kereta Api								
	- Perencanaan jaringan kereta api	Rencana Jaringan Pelayanan Kereta Api yang ditetapkan					APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA	
	- Pembebasan lahan jaringan kereta api	Rencana Jaringan Pelayanan Kereta Api yang ditetapkan					APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, BAPPEDA, BPN, DPUPR	
	b. Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
	TPST Regional								
	- Pembebasan Lahan TPST Regional	Kabupaten Magelang					APBN, APBD Kota, APBD Provinsi	DLH, BAPPEDA, DPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan Pemda regional Kawasan	
	- Pembangunan dan penataan TPST Regional	Kabupaten Magelang					APBN, APBD Kota,	DLH, BAPPEDA, DPUPR, Pemprov Jawa Tengah dan	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
								APBD Provinsi	Pemda regional Kawasan

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.7
Arahan Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
B	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
I	Perwujudan Pusat Kegiatan Kota								
	a. Perwujudan Sistem Perkotaan dilakukan melalui program :								
	1. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	BWP I Kota Magelang meliputi sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian							
	•Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota BWP I							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	•Penyusunan Peraturan Zonasi							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	•Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Lingkungan	Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Alun-alun.							
	• Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	2. Program Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota								
	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota BWP II, BWP III, BWP IV dan BWP V							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	• Penyusunan Peraturan Zonasi							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	• Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan							APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	• Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA	
II	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota								
	a. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan integrasi sarana prasarana angkutan umum dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki 	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DISHUB , DPUPR
	<ul style="list-style-type: none"> Studi kelayakan dan perencanaan pengembangan terminal penumpang tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Kawasan Lembah Tidar Terminal Kawasan Kebonpolo Terminal Kawasan Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo Terminal Kawasan Sukarno-Hatta Terminal Kawasan Sidotopo Terminal Kawasan Jalan 						APBD Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Kalimas							
	c. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	Hidran								
	- Perencanaan, Penataan dan pengembangan hidran	Kawasan pusat pelayanan kota, kawasan strategis daerah, kawasan perumahan perkepadatan tinggi, kawasan perdagangan dan jasa					APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR	
	3 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
	TPST								
	- Pembangunan dan penataan TPST	TPST Jurangombo, dan TPST lainnya					APBN, APBD Kota	DLH, DPUPR, BAPPEDA	
	4. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Inventarisasi dan Studi Pengembangan Jaringan Drainase	Seluruh Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	5. Perwujudan Sistem Jaringan Reklame								
	- Penyusunan Perda tentang pengembangan prasarana reklame	Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DPMPSTP, BAPPEDA
	- Penyusunan Perda/Perwal arahan insentif dan disinsentif	Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, DPMPSTP, BAPPEDA
	7. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	- Perencanaan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana	Kota Magelang						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DISPERKIM, KESBANGPOLINMAS, DISPERKIM
	8. Perwujudan Jalur Sepeda								
	- Perencanaan/Penyusunan Perwal dan Penetapan jalur sepeda	Jalur sepeda yang telah ditetapkan						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISHUB

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.8
Arahan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota
Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
C	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA								
I	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung								
	b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota								
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan/Masterplan RTH Kota Magelang	Kota Magelang					APBD Kota	BAPPEDA, DLH	
	- Penyediaan dan Pemenuhan RTH Publik 20% (Pembebasan Lahan untuk RTH)	A. Taman Kota pada Kawasan Strategis Kota Magelang meliputi : - Kawasan Sukarno-Hatta - Kawasan					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta, CSR	BBWS, Bappeda, DPUPR, DLH, BPN, Developer, Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Sidotopo - Kawasan Lembah Tidar - Kawasan Sport Center - Taman pengganti Gunung Tidar - Kawasan strategis lainnya B. Taman Kota yang tersebar di seluruh wilayah C. Kawasan perumahan berupa taman lingkungan D. RTH fungsi tertentu (Kawasan							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
		sempadan Irigasi kota dan Kawasan sempadan sungai) E. Pengembangan Pulau dan Median Jalan (jalur hijau jalan) F. Pengembangan Jalur Pejalan Kaki G. Kawasan lainnya pada Kota Magelang							
	c. Perwujudan RTH Kebun Raya Gunung Tidar								
	- Perencanaan dan Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Kebun Raya Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DLH, UPTD Gunung Tidar, DISHUB, DISPORAPAR, LIPI
	e. Perwujudan Kawasan Cagar								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Budaya								
	- revitalisasi dan/atau adaptasi terhadap bangunan cagar budaya	Seluruh Kota Magelang tersebar						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swadana	BAPPEDA, DPUPR, DISDIKBUD
	2. Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa								
	Sarana Pasar Rakyat								
	- Perencanaan Pasar Induk	Pasar Induk Kota Magelang						APBD Kota	DISPERINDAG, DISPERKIM, DISHUB, DPUPR, BAPPEDA
	4. Perwujudan Kawasan Pendidikan								
	- Perencanaan dan penataan Kawasan Pendidikan Sidotopo	Kawasan Sidotopo						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, Universitas Tidar

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	7. Perwujudan Kawasan Olahraga								
	- Perencanaan Sport Center	Sport Center/ GOR Samapta						APBD Kota	DISPORAPAR, BAPPEDA

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.9
Arahan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Internal Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS								
	- Penyusunan Masterplan/Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL)	Kawasan Strategis Kota Magelang						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA
	1. Kawasan Alun-alun dan								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	sekitarnya								
	- Perencanaan rencana detail/RTBL/masterplan kawasan alun-alun	Kawasan Alun – alun Kota						APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR
	- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Kawasan Alun – alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DLH
	- Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan kawasan alun-alun dan sekitarnya	Kawasan Alun – alun Kota						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, BAPPEDA, DLH, Investor, Swasta
	- Penyediaan dan penataan lokasi untuk kegiatan sektor informal	Kawasan Alun – alun Kota						APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISPERINDAG, DLH
	- Pengelolaan dan pengendalian kawasan sekitar alun-alun	Kawasan Alun – alun Kota						APBD Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DISPERINDAG

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
								, DLH	
	2. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar						APBN, APBD Provinsi dan Kota	DPUPR, DISHUB, BAPPEDA, DISPERINDAG	
	3. Kawasan Kebonpolo								
	- Revitalisasi dan pengembangan kawasan Kebonpolo	Kawasan Kebonpolo					APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, BPN, DISHUB, PT KAI, DLH	
	4. Rencana Pengembangan Kawasan Sukarno Hatta								
	- Perencanaan Masterplan Kawasan Pasar Induk	Kawasan Pasar Induk					APBD Kota	DISPERINDAG, DPUPR, BAPPEDA, BPN, DISHUB, DLH	
	5. Pengembangan Kawasan Sidotopo								
	- Penyusunan DED dan Masterplan Kawasan	Kawasan Sidotopo					APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, UN	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	Sidotopo							Tidar	
6.	Rencana Pengembangan Kawasan GOR Samapta								
	- Penataan dan Pengembangan Kawasan GOR Samapta	Kawasan GOR Samapta					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DPUPR, BAPPEDA, DISPORAPAR, DISHUB	
	b. Kawasan Strategis Kota Sosial dan Budaya								
1.	Kawasan Mantyasih								
	- Penyusunan DED dan Masterplan Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih					APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DLH, DPUPR, DISPORAPAR, BPN	
	- Penataan perumahan di Kawasan Mantyasih	Kawasan Mantyasih					APBD Kota	BAPPEDA, DISDIKBUD, DLH, DPUPR, DISPERKIM, BPN	
	2. Cagar Budaya								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Revitalisasi dan adaptasi cagar budaya	Kawasan Cagar Budaya						APBD Kota	BAPPEDA, DIS DIKBUD, DPUPR
	c. Kawasan Strategis Kota Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
	- Perencanaan dan Pengembangan kawasan Gunung Tidar sebagai Kebun Raya	Kawasan Gunung Tidar						APBN, APBD Kota	BAPPEDA, DPUPR, DLH, UPTD Gunung Tidar, DISHUB, DISPORAPAR, LIPI

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.10
Arahan Indikasi Program Perwujudan Pola Ruang Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal
Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
C	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA								
I	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung								
	a. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat								
	2. Sempadan Sungai								
	- Studi Penataan Sempadan Sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo					APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA	
	- Penetapan batas dan pemantapan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo					APBN, APBD Kota	BAPPEDA, BPN, DPUPR, BBWS	
	- Penataan dan pengembangan (revitalisasi) sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo					APBN, APBD Kota	BAPPEDA, BPN, DPUPR, BBWS	
	- Penataan dan pengembangan sempadan sungai sebagai RTH Publik	- Sungai Elo - Sungai Progo					APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Hibah,	BAPPEDA, BPN, DPUPR, DLH, BBWS, Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
								Bantuan, CSR	
	- Pembebasan Lahan sebagai RTH Publik sempadan sungai	- Sungai Elo - Sungai Progo						APBN, APBD Kota, Hibah, Bantuan , CSR	BBWS, BAPPEDA, DLH, DPUPR, Swasta, BPN
	3. Sempadan Jaringan Irigasi								
	- Studi penataan sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA, DLH
	- Penetapan batas dan pemantapan fungsi sempadan irigasi	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Kota	BBWS, DPUPR, BAPPEDA, DLH, BPN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	- Pengembangan, penataan dan pembebasan lahan sempadan irigasi sebagai RTH Publik	- Saluran Progo Manggis - Saluran Bening - Saluran Kota - Saluran Ngaran - Saluran Gandekan - Saluran Kedali						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, CSR, Swasta	BBWS, BAPPEDA, DPUPR, DLH, BPN, Swasta
	4. Sempadan Kereta Api								
	- Penataan sempadan kereta api	Sempadan Kereta Api Regional Ambarawa-Secang-Magelang Yogyakarta						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA
	- Pembebasan lahan terdampak sempadan	Sempadan Kereta Api Regional Ambarawa-Secang-Magelang Yogyakarta						APBN	Kementerian Perhubungan, PT KAI, DPUPR, BAPPEDA, BPN

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Tabel 3.11
Arahan Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis Penunjang Keterpaduan Wilayah Eksternal
Kota Magelang 2022-2026

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	PJM 3					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			2022	2023	2024	2025	2026		
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS								
	a. Kawasan Strategis Kota Pertumbuhan Ekonomi								
	1. Rencana Pengembangan Kawasan Sukarno Hatta								
	- Penataan dan Pengembangan Terminal Angkutan Barang	Terminal Angkutan Barang Kawasan Pasar Induk						APBN, APBD Provinsi, APBD Kota DISHUB, DPUPR, BPN, BAPPEDA, DLH, Kementerian Perhubungan	

Sumber: Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2020

Berdasarkan tabel – tabel di atas maka dalam rangka mewujudkan indikator program yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Indikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan RTRW Kota Magelang

NO	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan					

NO	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Pembangunan Manusia					
		Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
		Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA					
		Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					

NO	INDIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
		dan SDA					
		Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
		Sub kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
		Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen analisis terkait kondisi lingkungan dan juga integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Isu strategis dalam dokumen ini diperoleh dari analisis dari capaian indikator TPB yang belum mencapai target.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. KLHS memuat kajian antara lain:

- 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Berdasarkan data KLHS Kota Magelang tidak terdapat hubungan langsung/tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan Bappeda Kota Magelang yaitu dalam urusan penunjang pelayanan Lainnya. Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD
2. Hasil telaahan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota
3. Hasil analisis Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda provinsi Jawa Tengah
4. Hasil telaahan RTRW
5. Hasil analisis KLHS

Berdasarkan seluruh aspek analisis tersebut di atas maka issue strategis yang melingkupi Bappeda Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Data dan informasi yang lengkap, komprehensif, akurat, update dan akuntabel
3. Tingkat partisipasi masyarakat
4. Kompetensi sumber daya perencanaan
5. Pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda Kota Magelang yang telah dituangkan sebelum pada Bab 3, serta tugas pokok fungsi Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Bappeda Kota Magelang. Rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

4.1 Tujuan Bappeda Kota Magelang

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**”. Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

4.2 Sasaran Bappeda Kota Magelang

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan
- 2) Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Magelang beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2021 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KOND ISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	80,71 %	87,14 %	93,57 %	100 %	100 %
		1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5	42,86 % (12 OPD)	67,85 % (19 OPD)	78,85 % (22 OPD)	89,29 % (25 OPD)	100 % (28 OPD)	100 % (28 OPD)
		2) Meningkatkan efektifitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86 %	70 %	80 %	90%	100 %	100 %

Dalam sasaran *Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan* terdapat indikator program : **persentase elemen pembangunan yang terlibat**. Indikator program dimaksud selain mendukung misi 3, juga mendukung sasaran daerah pada misi 1: "**Meningkatnya partisipasi masyarakat**". Dalam pencapaiannya, indikator tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG dan Konsultasi publik yang melibatkan masyarakat Kota Magelang sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Magelang selama 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Magelang. Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Magelang memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

VISI Daerah : MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA			
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.			
TUJUAN DAERAH : Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif			
SASARAN DAERAH : Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Penyediaan data yang akurat dan up to date
			Meningkatkan keterlibatan elemen

			pembangunan dengan memperbanyak unsur pentahelix yang terlibat
			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sektoral
			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan OPD
	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi	Meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi melalui penyediaan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh OPD	Peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi
			Pemantauan tindak lanjut OPD atas rekomendasi evaluasi

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah menyusun strategi dana rah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Magelang, maka langkah operasional berikutnya adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tupoksi Bappeda. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan serta pendanaan Bappeda Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2021-2026

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	na	na		80,71		87,14		93,57		100		100	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan				Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5	%	42,86 (12 OPD)	42,86 (12 OPD)		67,85 (19 OPD)		78,85 (22 OPD)		89,29 (25 OPD)		100 (28 OPD)		100 (28 OPD)	
	Meningkatnya efektivitas fungsi pengendalian dan evaluasi capaian sasaran daerah				Persentase ketercapaian target sasaran daerah	%	63,86	63,86		70		80		90		100		100	

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN UNAN DAERAH		<i>Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas</i>	%	na	na	884.745.000	10,27	403.655.000	20,55	630.000.000	34,25	770.000.000	68,49	727.000.000	95,89	887.000.000
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		presentase elemen pembangunan yang terlibat	%		80	747.245.000	83	294.655.000	85	464.000.000	85	545.000.000	85	580.000.000	85	712.000.000
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah media partisipasi masyarakat dan jumlah elemen masyarakat yang hadir	media partisipasi		4	5	28.739.000	5	21.362.000	5	25.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	67.000.000
				jumlah elemen masyarakat yang hadir	elemen masyarakat		15	15		15		15		15		15		15	
				jumlah elemen yang menyampaikan usulan	elemen masyarakat		4	5		5		5		5		5		5	

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Tar get	Pagu Indikatif								
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah usulan yang ditindaklanjuti oleh PD	laporan	7	14	85.420.000	7	72.079.000	13	63.000.000	7	105.000.000	7	105.000.000	7	145.000.000
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah media partisipasi masyarakat dan jumlah elemen masyarakat yang hadir	media partisipasi	4	4	145.580.000	5	100.774.000	5	116.000.000	5	130.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000
						elemen masyarakat	15	15		15		15		15		15		15	
					jumlah usulan yang disampaikan	usulan	1204	1031		1031		1031		1031		1031		1031	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu	dokumen	2	2	487.506.000	2	100.440.000	2	260.000.000	2	270.000.000	2	280.000.000	2	300.000.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		perentase ketersediaan data dukung perencanaan	%	96	96	92.500.000	96	75.000.000	96	132.000.000	96	150.000.000	96	93.000.000	96	100.000.000
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase pemenuhan data profil daerah	dokumen		2	92.500.000	2	75.000.000	2	132.000.000	2	150.000.000	2	93.000.000	2	100.000.000
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	%	na	60	45.000.000	65	34.000.000	70	34.000.000	75	75.000.000	80	54.000.000	85	75.000.000
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis hasil rencana pembangunan	laporan			45.000.000	2	34.000.000	2	34.000.000	2	75.000.000	2	54.000.000	2	75.000.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Target	Pagu Indikatif								
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNAN DAERAH		<i>Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	%	na	na	1.141.931.000	75	766.247.000	80	1.087.150.000	90	1.158.650.000	100	1.209.150.000	100	1.132.150.000
					<i>Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</i>	%	na	na		67		83		100		100		100	
					<i>Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	%	na	na		67		67		100		100		100	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	194.146.000	100	164.540.000	100	285.850.000	100	277.000.000	100	507.850.000	100	92.750.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusun an RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerinta han yang tersedia	doku men		-	-	-	-	6	91.000.000	2	66.000.000	3	101.850.0 00	2	27.750.00 0	
					Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk RKPD	doku men							1	12.500.000	1	33.000.000	1	33.350.00 0	1	13.750.00 0
					Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk Perubaha n RKPD dan Perubaha n Renja OPD	doku men							1	12.500.000	1	33.000.000	1	33.500.00 0	1	14.000.00 0
					Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk RANTEKN	doku men							1	12.000.000						

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					<i>O RPJPD 2025-2045</i>														
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024- 2029)</i>	doku men						1	14.000.000						
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk RPJPD 2025-2045</i>	doku men						1	20.000.000						
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk RPJMD 2024-2029</i>	doku men						1	20.000.000						
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk</i>	doku men									1	35.000.00 0			

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
					<i>Reviu RPJMD 2024-2029</i>														
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil rencana pembang unan Bidang Pemerinta han	doku men		4	32.900.00 0	-	-	1	12.500.000	1	33.000.000	3	103.000.0 00	1	14.000.00 0
					<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisa si perencana an bidang pemerinta han</i>			1	20.000.00 0										
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk Renja OPD</i>	doku men		1	5.600.000			1	12.500.000	1	33.000.000	1	33.500.00 0	1	14.000.00 0
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerinta han untuk Reviu Renstra</i>	doku men		1	5.600.000						1	33.500.00 0			

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					OPD														
					Jumlah laporan pendampingan bidang pemerintahan untuk Reviu Renstra OPD	doku men		1	1.700.000						1	36.000.000			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang pemerintahan	doku men		6	64.173.000	5	84.240.000	1	22.000.000	1	35.000.000	1	48.000.000	-	-
					Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan	doku men				1	20.000.000	1	22.000.000	1	35.000.000	1	48.000.000		
					Jumlah laporan desk bidang	doku men		1	5.600.000	1	12.240.000								

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					<i>pemerintahan untuk RKPD</i>														
					<i>Jumlah laporan desk bidang pemerintahan untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>dokumen</i>		1	5.600.000	1	12.240.000								
					<i>Jumlah laporan desk bidang pemerintahan untuk Reviu RPJMD</i>	<i>dokumen</i>		1	5.600.000	1	12.240.000								
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Renja OPD</i>	<i>dokumen</i>		1			12.240.000								
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Review Renstra</i>	<i>dokumen</i>		1			12.240.000								

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								2020	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif
					<i>Pendampingan Penyusunan Dokumen Review/Perubahan Renstra</i>	<i>dokumen</i>		1	47.373.000	1	3.040.000									
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPd bidang pembangunan manusia yang tersedia	<i>dokumen</i>		0	-	0	-	6	122.850.000	2	72.000.000	3	108.000.000	2	34.000.000	
			Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk RKPd		<i>dokumen</i>								1	15.800.000	1	36.000.000	1	36.500.000	1	17.000.000
			Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia		<i>dokumen</i>								1	15.800.000	1	36.000.000	1	36.500.000	1	17.000.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD														
					Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk RANTEKN O RPJPD 2025-2045	doku men						1	15.450.000						
					Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024- 2029)	doku men						1	15.800.000						
					Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan	doku men						1	30.000.000						

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					<i>manusia untuk RPJPD 2025-2045</i>														
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangu nan manusia untuk RPJMD 2024-2029</i>	doku men						1	30.000.000						
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangu nan manusia untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	doku men									1	35.000.000			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil rencana pembang unan Bidang pembang unan manusia	doku men		4	32.900.000	-	-	1	15.500.000	1	36.000.000	3	109.000.000	1	17.000.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang pembangunan manusia			1	20.000.000										
					Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Renja OPD	doku men		1	5.600.000			1	15.500.000	1	36.000.000	1	36.500.000	1	17.000.000
					Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Reviu Renstra OPD	doku men		1	5.600.000							1	36.500.000		
					Jumlah laporan pendampingan bidang pembangunan manusia untuk	doku men		1	1.700.000							1	36.000.000		

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					<i>Reviu Renstra OPD</i>														
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang Pembangunan Manusia	doku men		6	64.173.00 0	6	80.300.00 0	1	22.000.000	1	35.000.000	1	38.000.00 0	-	-
					<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencana an bidang Pembangu nan Manusia</i>	<i>doku men</i>						1	22.000.000	1	35.000.000	1	38.000.00 0		
					<i>Jumlah laporan desk bidang Pembangu nan Manusia untuk RKPD</i>	<i>doku men</i>		1	5.600.000	1	15.300.00 0								

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					Jumlah laporan desk bidang Pembangunan Manusia untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	doku men		1	5.600.000	1	15.300.000								
					Jumlah laporan desk bidang Pembangunan Manusia untuk Reviu RPJMD	doku men		1	5.600.000	1	15.300.000								
					Jumlah laporan hasil desk bidang Pembangunan Manusia untuk Renja OPD	doku men		1		1	15.300.000								
					Jumlah laporan hasil desk bidang Pembangunan	doku men		1		1	15.300.000								

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					<i>Manusia untuk Review Renstra</i>														
					<i>Pendampi ngan Penyusuna n Dokumen Review/Pe rubahan Renstra</i>	<i>doku men</i>		1	47.373.00 0	1	3.800.000								
			Koordinasi Perencana an Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)		persentas e ketersedia an kajian strategis Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	78	80	509.982.0 00	80	341.548.0 00	85	456.500.00 0	90	524.750.00 0	95	405.200.0 00	100	588.600.0 00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusun an RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekono mian dan perekono mian yang tersedia	<i>doku men</i>		0	0	0	0	4	66.000.000	4	107.950.00 0	2	73.400.00 0	3	52.300.00 0

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk RKPD	dokumen						1	16.000.000	1	26.450.000	1	36.700.000	1	17.400.000
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	dokumen						1	16.000.000	1	26.500.000	1	36.700.000	1	17.400.000
					Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045	dokumen						1	17.000.000						
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Rantekno RPJMD Pilkada	dokumen						1	17.000.000						

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif									
					<i>serentak (RPJMD 2024- 2029)</i>																
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekono mian untuk RPJPD 2025-2045</i>	doku men							1	30.000.000							
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekono mian untuk RPJMD 2024-2029</i>	doku men							1	25.000.000							
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekono mian untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	doku men												1	17.500.00 0		

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif
												Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang perekonomian	doku men		4	32.900.000	4	23.600.000	1
					Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang perekonomian			1	20.000.000	1	12.000.000									
					Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk Renja OPD	doku men		1	5.600.000	1	5.000.000	1	16.000.000	1	26.000.000	1	36.700.000	1	17.500.000	
					Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk Reviu Renstra OPD	doku men		1	5.600.000	1	5.000.000			1	26.600.000			1	18.000.000	

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026		
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
					<i>Jumlah laporan pendampingan bidang perekonomian untuk Reviu Renstra OPD</i>	dokumen		1	1.700.000	1	1.600.000			1	22.000.000			1	13.000.000	
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang perekonomian	dokumen		6	344.082.000	6	280.448.000	2	70.000.000	2	127.000.000	2	145.000.000	2	128.000.000	
			<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang perekonomian</i>		dokumen							1	20.000.000	1	22.000.000	1	35.000.000	1	18.000.000	
			<i>Jumlah laporan desk bidang perekonomian untuk</i>		dokumen		1	5.600.000	1	4.021.000										

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
					RKPD														
					Jumlah laporan desk bidang perekonomian untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	doku men		1	5.600.000	1	5.000.000								
					Jumlah laporan desk bidang perekonomian untuk Reviu RPJMD	doku men		1	5.600.000	1	5.000.000								
					Jumlah Laporan FEDEP	doku men		1	47.373.00 0	1	45.643.00 0	1	50.000.000	1	105.000.00 0	1	110.000.0 00	1	110.000.0 00
					Jumlah Dokumen Roadmap Pengembangan Daya Saing	doku men		1	159.909.0 00	1	129.205.0 00								
					Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM	doku men		1	120.000.0 00	1	91.579.00 0								

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusun an RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekono mian dan SDA yang tersedia	doku men		0	0	0	0	4	61.000.000	4	105.500.00 0	2	73.400.00 0	3	52.300.00 0
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RKPD	doku men						1	13.500.000	1	24.000.000	1	36.700.00 0	1	17.400.00 0
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastrukt ur untuk Perubaha n RKPD dan Perubaha n Renja OPD	doku men						1	13.500.000	1	24.000.000	1	36.700.00 0	1	17.400.00 0
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RANTEKN O RPJPD	doku men						1	17.000.000						

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					2025-2045														
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)	doku men					1	17.000.000							
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RPIPD 2025-2045	doku men							1	27.500.000					
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RPJMD 2024-2029	doku men							1	30.000.000					
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk Reviu RPJMD 2024-2029	doku men											1	17.500.000	

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021			2022		2023		2024		2025		2026			
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif												
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang SDA	doku men		-	-	-	-	1	13.500.000	3	74.700.000	1	36.700.000	3	58.500.000			
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk Renja OPD							1	13.500.000	1	26.100.000	1	36.700.000	1	17.500.000			
					Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk Reviu Renstra OPD									1	26.600.000			1	18.000.000			
					Jumlah laporan pendampingan bidang SDA untuk Reviu Renstra OPD									1	22.000.000			1	23.000.000			

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang SDA	dokumen		8	133.000.000	7	37.500.000	2	230.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	2	249.000.000
					Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang SDA	dokumen		1	25.000.000	1	21.024.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
					Jumlah laporan desk bidang SDA untuk RKPD	dokumen		1	4.560.000	1	2.994.000								
					Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	dokumen		1	3.000.000	1	2.994.000								
					Jumlah laporan desk	dokumen		1	3.000.000	1	2.994.000								

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
					<i>bidang SDA untuk Reviu RPJMD</i>														
					<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Renja</i>	<i>doku men</i>		1	3.000.000	1	2.994.000								
					<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Reviu Renstra</i>	<i>doku men</i>		1	3.000.000	1	2.994.000								
					<i>Jumlah laporan pendampi ngan reviu renstra</i>	<i>doku men</i>		1	1.500.000	1	1.506.000								
					<i>Jumlah Dokumen Review Pengemba ngan Urban Farming</i>	<i>doku men</i>		1	89.940.00 0										
					<i>Jumlah Dokumen Perencana an Kualitas Lingkunga n Hidup Kota Magelang</i>	<i>doku men</i>						1	200.000.00 0						

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
							line	2020	Target	Pagu Indikatif	Target								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Ruang Terbuka Hijau	dokumen												1	209.000.000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	83	85	437.803.000	89	260.159.000	90	344.800.000	95	356.900.000	100	296.100.000	9	450.800.000
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Infrastruktur yang tersedia	dokumen		0	0	0	0	4	71.200.000	4	102.200.000	2	73.400.000	3	82.300.000
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk RKPD	dokumen						1	15.600.000	1	26.100.000	1	36.700.000	1	27.400.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	dokumen						1	15.600.000	1	26.100.000	1	36.700.000	1	27.400.000
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045	dokumen						1	20.000.000						
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)	dokumen						1	20.000.000						
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur	dokumen								1	25.000.000				

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					<i>ur untuk RPJPD 2025-2045</i>														
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur ur untuk RPJMD 2024-2029</i>	dokumen							1	25.000.000					
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur ur untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	dokumen												1	27.500.000
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang Infrastruktur	dokumen		-	-	-	-	1	15.600.000	3	74.700.000	1	36.700.000	3	78.500.000
					<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur ur untuk Renja OPD</i>							1	15.600.000	1	26.100.000	1	36.700.000	1	27.500.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target								
					Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Reviu Renstra OPD									1	26.600.000			1	28.000.000
					Jumlah laporan pendampingan bidang infrastruktur untuk Reviu Renstra OPD									1	22.000.000			1	23.000.000
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang Infrastruktur	dokumen		9	437.803.000	8	260.159.000	2	258.000.000	2	180.000.000	2	186.000.000	3	290.000.000
					Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang	dokumen		1	50.000.000	1	35.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					infrastrukt ur														
					Jumlah laporan desk bidang infrastrukt ur untuk RKPD	doku men		1	5.000.000	1	5.000.000								
					Jumlah laporan desk bidang infrastrukt ur untuk Perubaha n RKPD dan Perubaha n Renja OPD	doku men		1	5.000.000	1	5.000.000								
					Jumlah laporan desk bidang infrastrukt ur untuk Reviu RPJMD	doku men		1	5.000.000	1	5.000.000								
					Jumlah laporan desk bidang infrastrukt ur untuk Renja	doku men		1	5.000.000	1	5.000.000								

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
					Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Reviu Renstra	doku men		1	5.000.000	1	5.000.000								
					Jumlah laporan pendampingan reviu renstra	doku men		1	1.600.000	1	1.600.000								
					Jumlah Dokumen Perencanaan CBD Kawasan Shopping/Lembah Tidar	doku men		1	162.644.000										
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	doku men						1	198.000.000						
					Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi									1	120.000.000	1	121.000.000	1	70.000.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
					Pokja PKP														
					Jumlah dokumen SSK	doku men		1	198.559.0 00	1	198.559.0 00							1	150.000.0 00
			PROGRAM PENUNJ ANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA		Persentas e pelayanan internal perangkat daerah yang berkualita s	%	na	80,5	5.792.041. 000	81, 0	8.534.007. 000	85,7	10.074.900 .000	86, 0	9.652.000. 000	85, 7	9.058.500. 000	85, 0	9.057.500. 000
			Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersedia an (CK) dokumen perencana an, pengangg aran, dan evaluasi kinerja PD (%)	%		100	22.551.00 0	100	196.530.0 00	100	207.000.00 0	100	217.500.00 0	100	227.500.0 00	100	227.500.0 00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencana an perangkat daerah yang disusun (Renja/Re nstra) (dokumen)	doku men		2	6.968.000	1	185.207.0 00	1	190.000.00 0	2	200.000.00 0	1	210.000.0 00	1	210.000.0 00

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun (dokumen)	dokumen		1	3.150.000	1	2.415.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun (dokumen)	dokumen		1	3.141.000	1	2.333.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun (dokumen)	dokumen		1	1.240.000	1	930.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (dokumen)	dokumen		1	1.280.000	1	960.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang	dokumen		2	6.772.000	2	4.685.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					disusun (laporan)														
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)	%		80	5.147.526. 000	85	7.494.896. 000	90	7.524.000. 000	95	7.524.000. 000	98	7.524.000. 000	100	7.524.000. 000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan nya (orang)	orang	32	32	5.121.936. 000	33	7.457.651. 000	33	7.500.000. 000	33	7.500.000. 000	33	7.500.000. 000	3	7.500.000. 000
				Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausa haan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang disusun (jenis)	Jenis	3	3	22.495.00 0	3	34.728.00 0	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.00 0	3	20.000.00 0
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	doku men	1	1	1.507.000	1	1.274.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target								
				Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD yang disusun (dokumen)														
				Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun (dokumen)	dokumen	1	1	1.588.000	1	1.243.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	%		100	126.185.000	100	214.822.000	100	232.500.000	100	248.000.000	100	264.000.000	100	272.500.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya (ruang)	ruang	28	28	4.991.000	28	8.207.000	28	10.000.000	28	12.000.000	28	13.000.000	28	14.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic		47	47	24.735.000	47	31.320.000	49	32.000.000	49	34.000.000	49	36.000.000	49	38.000.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021			2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif										
					Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis)	jenis	2	2	12.648.000	2	15.624.000	2	16.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	2	19.000.000	
					Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian (orang)	orang	45	45	12.087.000	45	15.696.000	47	16.000.000	47	17.000.000	47	18.000.000	47	19.000.000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	12	12	9.595.000	12	7.388.000	15	12.000.000	15	13.000.000	15	14.000.000	15	15.000.000	
					jenis barang yang dicetak (jenis)	jenis	9	9	9.070.000	9	6.936.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000	
					Jenis dokumen yang digandakan (jenis)	jenis	3	3	525.000	3	452.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan-	jenis	3	3	3.360.000	3	3.360.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.500.000	3	5.000.000	

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get
					undangan (jenis)														
				Penyediaan Bahan/Materi al	Jenis bahan / material yang dibeli (item)	item	26	26	13.560.00 0	26	14.843.00 0	30	18.000.000	30	19.000.000	30	20.000.00 0	30	22.000.00 0
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjunga n)	kunju ngan	6	6	2.376.000	6	2.376.000	12	6.500.000	12	7.000.000	12	7.500.000	12	8.500.000
				Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	kali	44	51	67.568.00 0	60	147.328.0 00	72	150.000.00 0	78	159.000.00 0	84	169.000.0 00	88	170.000.0 00
					Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanak an (kali)	kali	12	12	9.180.000	12	9.180.000	12	10.000.000	12	18.000.000	12	18.000.00 0	12	19.000.00 0
					Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanak an (kali)	kali	32	39	58.388.00 0	48	138.148.0 00	60	140.000.00 0	66	141.000.00 0	72	151.000.0 00	76	151.000.0 00

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Target	Pagu Indikatif								
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	4	3	53.750.000	1	36.700.000	24	1.467.900.000	21	959.500.000	16	280.000.000	10	206.000.000
				Pengadaan Alat kantor	Jumlah Alat kantor yang dibeli	unit						3	9.000.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3	18.000.000
				Pengadaan Alat kantor lainnya	Jumlah Alat kantor lainnya yang dibeli	Unit						5	10.000.000	3	7.500.000	3	9.000.000	3	10.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli (unit)	unit	1	3	53.750.000	1	10.000.000	10	150.000.000	10	160.000.000	5	75.000.000	4	60.000.000
				Pengadaan peralatan Personal Komputer	Jumlah peralatan personal Komputer yang dibeli	Unit						6	60.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000		
				Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	3	3		3		6	955.000.000	4	650.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target
					yang dibeli														
				Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	jenis	2	2		2		5	30.000.000	5	35.000.000	6	45.000.000	6	50.000.000
				Pengadaan Alat rumah tangga Pembersih	Jumlah alat rumah tangga pembersih yang dibeli	Unit				1	2.700.000								
				Pengadaan Alat rumah tangga Dapur	Jumlah Alat rumah tangga Dapur yang dibeli	jenis				20	4.000.000	20	5.000.000	20	6.000.000	20	7.000.000	20	8.000.000
				Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Gorden)	Jumlah alat rumah tangga lainnya yang dibeli	M2						712 M2	142.400.000						
				Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat studio dan komunikasi yang dibeli	Unit				1	20.000.000	1	30.000.000						
				Pengadaan alat rumah tangga- pemadam kebakaran	Jumlah alat rumah tangga- pemadam kebakaran	Unit						1	2.500.000						

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target								
					yang dibeli														
				Pengadaan Meja kerja pejabat	Jumlah Meja kerja pejabat yang dibeli	unit						5	30.000.000						
				Pengadaan Kursi kerja pejabat	Jumlah Kursi kerja pejabat yang dibeli	Unit						6	18.000.000	6	20.000.000	6	24.000.000		
				Pengadaan Alat studio cetak	Jumlah pengadaan Alat studio cetak yang dibeli	Unit						1	20.000.000						
				Pengadaan alat komunikasi dan telepon	Jumlah alat komunikasi dan telepon yang dibeli	Unit						3	6.000.000	2	4.000.000				
				Pengadaan Alat keamanan (CCTV)	Jumlah Alat keamanan (CCTV) yang dibeli	Unit								5	15.000.000				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintah	%	100	100	288.618.000	100	291.118.000	100	319.500.000	100	353.000.000	100	387.000.000	100	426.000.000

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
					han Daerah (%)														
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat yang terkelola dan terkirim	Surat	3	3	10.158.00 0	4	9.041.000	4	13.000.000	4	15.000.000	4	17.000.00 0	4	18.000.00 0
			Jenis surat yang dikelola (jenis)		jenis	2	2	8.658.000	2	8.041.000	2	10.000.000	2	11.500.000	2	13.000.00 0	2	14.000.00 0	
			Jumlah surat yang dikirim (surat)		surat	1	1	1.500.000	2	1.000.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberda ya yang dibayar tiap bulan (rekening)	rekeni ng	3	3	82.800.00 0	3	82.800.00 0	3	91.000.000	3	100.000.00 0	3	110.000.0 00	3	121.000.0 00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarka n gaji dan tunjangan nya (dalam 1 tahun) (orang)	orang	8	8	195.660.0 00	8	199.277.0 00	8	215.500.00 0	8	238.000.00 0	8	260.000.0 00	8	287.000.0 00

tj ua n	sasa ran	ko de	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satua n Indika tor	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
								202 0	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get								
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerinta han daerah (%)	%	100	100	153.411.0 00	100	299.941.0 00	100	324.000.00 0	100	350.000.00 0	100	376.000.0 00	100	401.500.0 00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihar a	unit	15	15	77.640.00 0	15	138.741.0 00	15	140.000.00 0	15	150.000.00 0	15	160.500.0 00	15	165.500.0 00	
				Jumlah STNK kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarka n pajaknya (unit)	unit	15	15	6.750.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.500.000	15	8.500.000	

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021			2022		2023		2024		2025		2026	
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
					Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)	unit	15	15	70.890.000	15	130.741.000	15	132.000.000	15	142.000.000	15	152.000.000	15	157.000.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	unit	9	9	24.040.000	9	44.716.000	9	50.000.000	9	55.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000	
					Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (unit)	unit	9	9	1.350.000	9	1.490.000	9	1.500.000	9	1.500.000	9	1.500.000	9	1.500.000	
					Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang	unit	9	9	22.690.000	9	43.226.000	9	48.500.000	9	53.500.000	9	58.500.000	9	63.500.000	

tujuan	sasaran	kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Base line	2021		2022		2023		2024		2025		2026			
								2020	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	
					terpelihara (unit)																
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara (unit)	unit	1	1	1.000.000	3	3.000.000	4	4.000.000	5	5.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)	jenis	10	10 jenis	36.738.00 0	11 unit	53.765.00 0	12 unit	60.000.000	14 unit	65.000.000	14 unit	70.000.00 0	15 unit	75.000.00 0		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi (unit)	unit	2	2	13.993.00 0	2	59.719.00 0	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.00 0	2	90.000.00 0		
			JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN								7.818.717. 000		9.703.909. 000		11.792.050 .000		11.580.650 .000		10.994.65 0.000		11.076.65 0.000

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda Kota Magelang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda Kota Magelang. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	TUJUAN							
1	kualitas perencanaan pembangunan daerah	NA	80,71	87,14	93,57	100	100	100
	SASARAN							
1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,57% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
2	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	63,86%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Indikator Program							
1	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	na	10,27%	20,55%	34,25 %	68,49 %	95,89 %	95,89 %
2	* Tingkat implementasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,	Na	75%	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %

NO	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	*Tingkat implementasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Na	67%	83%	100%	100%	100%	100%
	*Tingkat implementasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Na	67%	67%	100%	100%	100%	100%

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra OPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD, digunakan untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Berdasarkan atas hal tersebut, maka pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah dari sisi perencanaan selama 5 (lima) tahun mendatang. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan dapat membantu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan visi misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Bappeda Kota Magelang akan ditetapkan pada Tahun 2021, setelah RPJMD Kota Magelang selesai ditetapkan pada bulan September Tahun 2021, dan efektif dilaksanakan pada tahun 2022. Renstra Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2024. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda Kota Magelang.

Beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Bappeda Kota Magelang berkewajiban untuk mendukung pencapaian target dan melaksanakan program dalam Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun dalam rangka menjaga

- konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
 5. Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Bappeda Kota Magelang;
 6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur Bappeda Kota Magelang untuk berpartisipasi serta berkomitmen dalam pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan Renstra Kota Magelang.

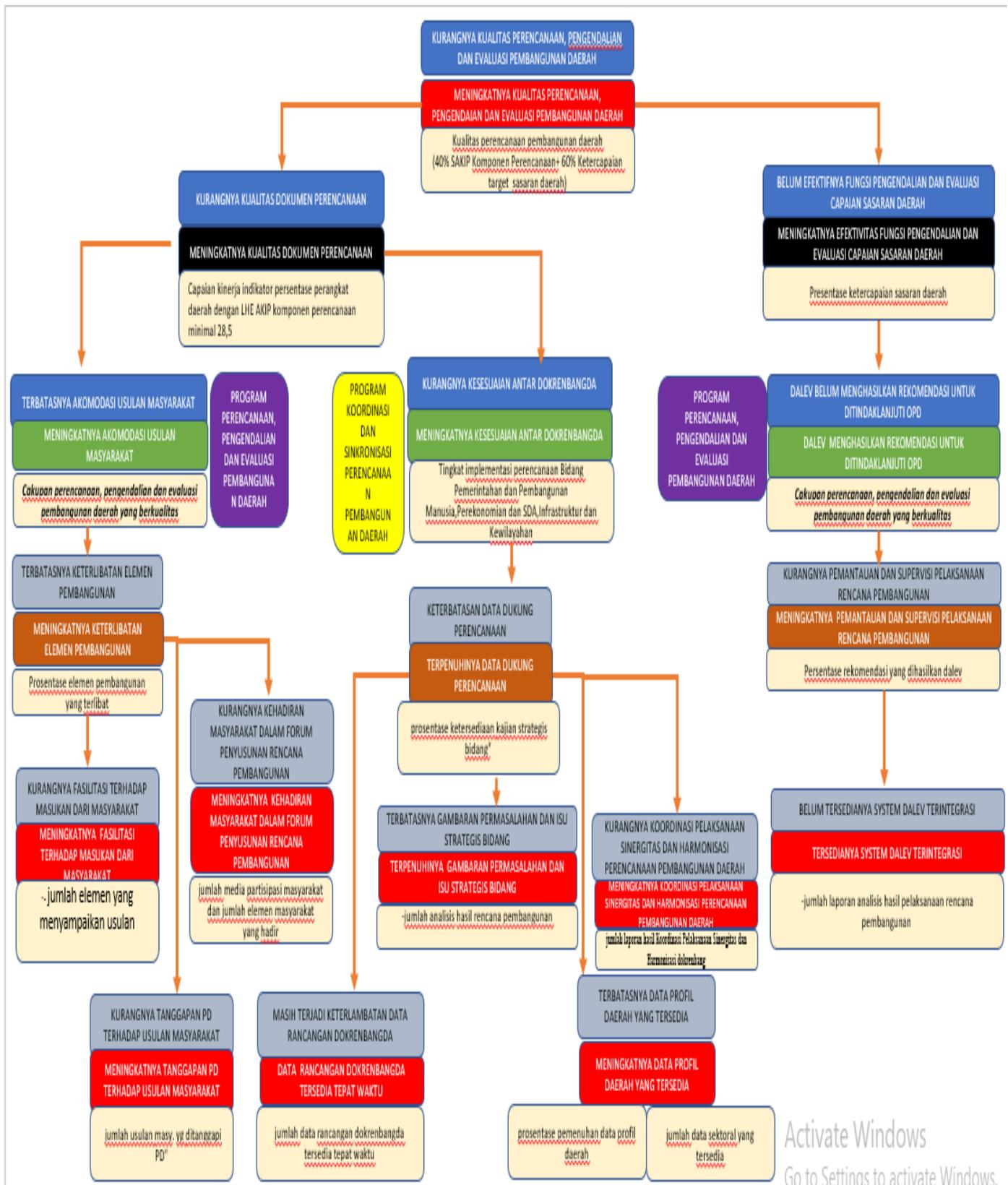
Magelang, 23 September 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG



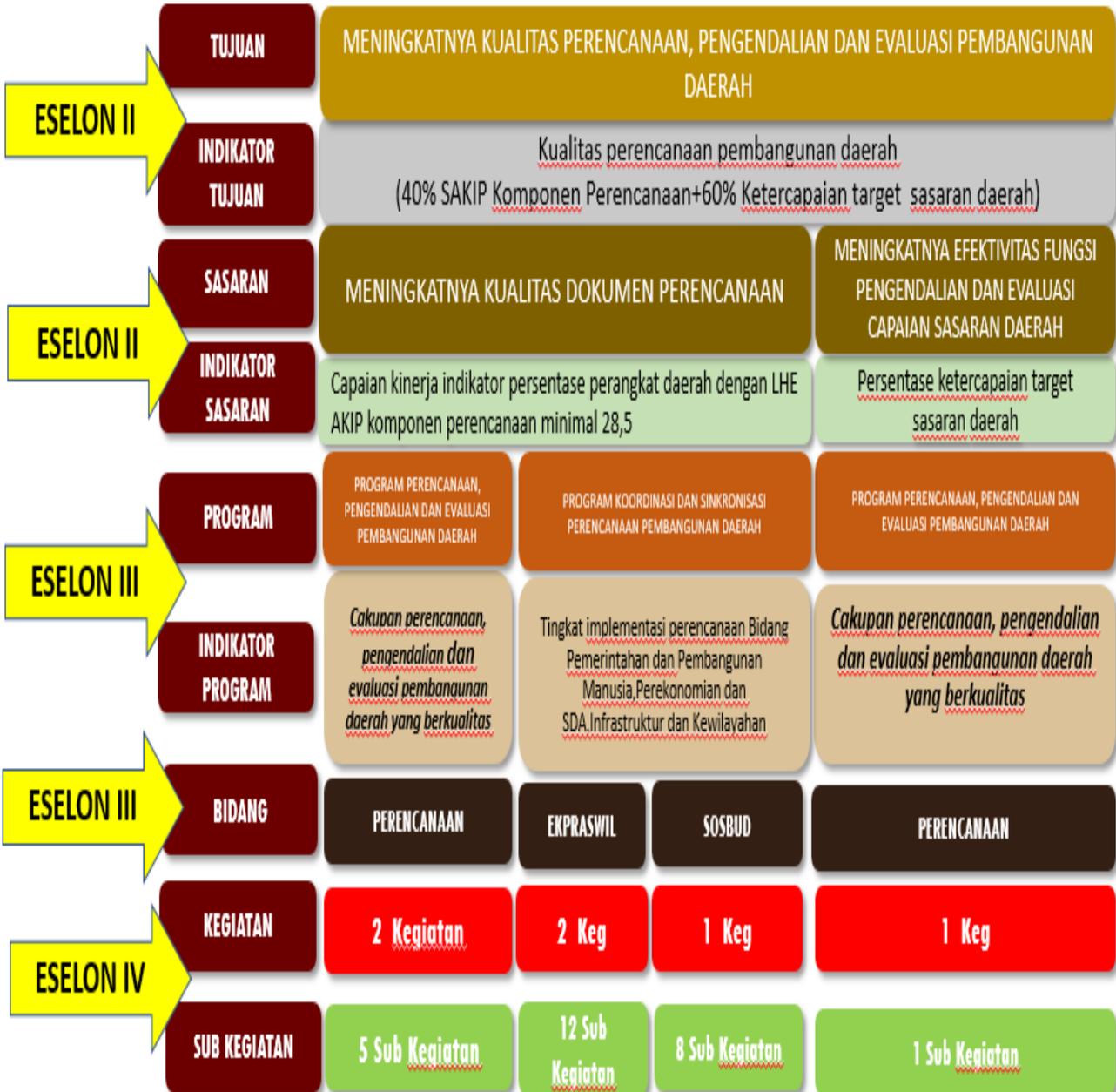
HANDINI RAHAYU, ST. MEng.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002

LAMPIRAN A

POHON KINERJA BAPPEDA KOTA MAGELANG

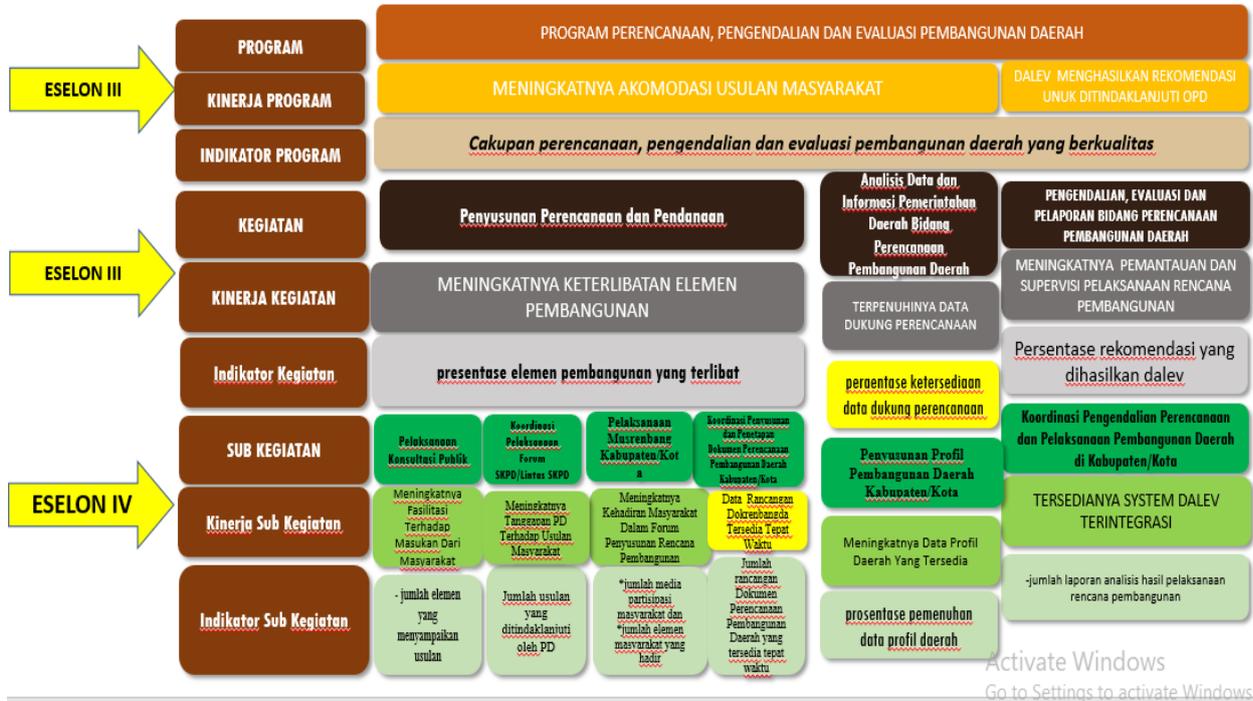


CASCADING BAPPEDA KOTA MAGELANG



Activate Win

CASCADING BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA KOTA MAGELANG



CASCADING BIDANG SOSBUD BAPPEDA KOTA MAGELANG



CASCADING BIDANG PRASARANA WILAYAH BAPPEDA KOTA MAGELANG (I)



CASCADING BIDANG PRASARANA WILAYAH BAPPEDA KOTA MAGELANG (II)



LAMPIRAN C

DIFINISI OPERASIONAL

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
A	TUJUAN	kualitas perencanaan pembangunan daerah	Angka yang menunjukkan nilai kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana yang ditandai oleh Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5 dan Persentase ketercapaian target sasaran daerah , dengan interval nilai 1-100	<p>Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5</p> <hr/> <p>Persentase ketercapaian target sasaran daerah</p>	((Persentase capaian kinerja SAKIP komponen perencanaan x 60%)+ (Persentase ketercapaian target sasaran daerah x40%))
B.1	SASARAN 1	prosentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 28,5	Persentase yang menunjukkan pemerataan kualitas dokumen perencanaan, dilihat dari perbandingan antara jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5 dengan jumlah seluruh PD	<p>jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh PD</p>	(jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal28,5 : Jumlah seluruh PD) x 100%

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Definisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
B.2	SASARAN 2	persentase ketecapaian target sasaran daerah	Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya dengan jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD	Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD dengan status capaian target minimal sangat tinggi (90%) Jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD	(Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya: Jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD) x 100%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Cakupan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang dengan jumlah seluruh usulan masyarakat dan Jumlah rekomendasi hasil dalev yang dihasilkan	Sesuai di bawah ini	
I			Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang dengan jumlah seluruh usulan masyarakat. Hal ini untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam pendekatan partisipasi pada proses perencanaan pembangunan. Usulan masyarakat sebagai salah satu	Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang direalisasikan Jumlah seluruh usulan masyarakat dalam musrenbang	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
			komponen penting yang menentukan kualitas dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang partisipatif akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana		
			Jumlah rekomendasi hasil dalev yang dihasilkan dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil dalev yang ditindaklanjuti OPD	jumlah rekomendasi dalev yang ditindaklanjuti jumlah seluruh rekomendasi dalev	$\left(\frac{\sum \text{rekomendasi pada laporan hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh OPD}}{\sum \text{rekomendasi yang dihasilkan dari aktivitas pengendalian dan evaluasi}} \times 100\% \right)$
I.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase elemen pembangunan yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan	Persentase yang menunjukkan elemen pembangunan apa saja yang terlibat dalam proses penyusunan rencana pembangunan -Elemen pembangunan yang dimaksud yaitu akademisi, bisnis/ swasta, komunitas, media - Bentuk keterlibatan meliputi kehadiran dalam konsultasi publik, forum FGD, musrenbang, dan/	jumlah elemen pembangunan yang terlibat jumlah seluruh elemen pembangunan yang seharusnya terlibat	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Definisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
			atau pemberian saran masukan usulan pada kegiatan-kegiatan tersebut maupun melalui media digital yang tersedia		
I.1.1	Sub Keg Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah media partisipasi masyarakat dan jumlah elemen masyarakat yang hadir	Jumlah media partisipasi masyarakat menunjukkan jumlah media/ sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) meliputi media pertemuan tatap muka dan non tatap muka. Apabila terdapat lebih dari satu sarana dari jenis media yang sama maka untuk masing-masing sarana dihitung sebagai media yang berbeda	jumlah youtbe,web, zoom meeting	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		jumlah elemen pembangunan yang menyampaikan usulan	jumlah elemen masyarakat	lansia, forum anak, forum ukm	
I.1.2	Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah usulan yang ditindaklanjuti oleh PD	jumlah ditindaklanjuti oleh PD	diakomodir/ ditanggapi PD	
I.1.3	Sub Keg Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah media partisipasi masyarakat dan jumlah elemen masyarakat yang hadir	jumlah media dan jumlah masyarakat yg hadir	jumlah media dan jumlah masyarakat yg hadir	
		jumlah usulan yang disampaikan	jumlah usulan peserta	usulan peserta	
I.1.4	Sub Keg Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen tepat waktu sesuai ketentuan	tepat waktu sesuai ketentuan	
I.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan data dukung perencanaan	persentase ketersediaan data dukung perencanaan dan prosentase ketersediaan kajian strategis bidang	data dukung perencanaan dan kajian strategis bidang	persentase ketersediaan data dukung perencanaan dan prosentase ketersediaan kajian strategis bidang

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Definisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
I.2.1	Sub Keg Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase pemenuhan data profil daerah	data profil daerah yang tersedia dibandingkan data profil daerah yang dibutuhkan	jumlah data profil daerah	
I.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	jumlah rekomendasi urusan yang dihasilkan dalev dibagi jumlah seluruh urusan dalev	jumlah rekomendasi urusan yang dihasilkan dalev jumlah seluruh urusan dalev	jumlah rekomendasi urusan yang dihasilkan dalev / jumlah seluruh urusan dalev x 100%
I.3.1	Sub Keg Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis hasil rencana pembangunan	laporan monev yg memuat capaian kinerja dan hasil analisis faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja	jumlah laporan hasil monev	
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 3. Tingkat	Persentase yang menunjukkan kesesuaian nomenklatur program beserta indikator dan target RPJMD dengan Renstra sesuai bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Total program yang ada pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan RPJMD Total program RPJMD Total indikator yang ada pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan RPJMD Total indikator RPJMD	$KI = \left(\frac{\sum \text{indikator di Renstra OPD Bidang PPM, Eko dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah yang sesuai RPJMD}}{\sum \text{seluruh program di renstra PD Bidang PPM, Eko dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah}} \times 100\% \right)$ $KP = \left(\frac{\sum \text{program di Renstra OPD Bidang PPM, Eko dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah yang sesuai RPJMD}}{\sum \text{seluruh program di renstra PD Bidang PPM, Eko dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah}} \times 100\% \right)$ $KT = \left(\frac{\sum \text{target di Renstra OPD Bidang PPM, Eko dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah yang sesuai RPJMD}}{\sum \text{seluruh target di renstra PD Bidang PPM, Eko dan SDA, Infrastruktur dan Wilayah}} \times 100\% \right)$ <p>Kesesuaian = (KI x 30%) + (KT x 30%) + (KP x 40%)</p>

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Total target yang ada pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan RPJMD Total target indikator RPJMD	
II.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase yang menunjukkan ketercukupan kebutuhan kajian strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD -kajian strategis meliputi kajian permasalahan dan isu strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia -laporan capaian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia -laporan hasil koordinasi tematik	jumlah kajian permasalahan dan isu strategis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dihasilkan jumlah kajian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dibutuhkan dalam penyusunan dokrenbangda	$\left(\frac{\sum \text{seluruh kajian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang tersedia}}{\sum \text{seluruh kajian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dibutuhkan}} \times 100\% \right)$

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
			bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
II.1.1	Sub Keg Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan yang tersedia	jumlah kajian untuk penyusunan dokumen RKPD,RPJMD,RPJPD (gambaran permasalahan dan Isu - isu strategis bidang)"bahan diperoleh dari desk review RPJMD,RKPD,RPJPD	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
II.1.2	Sub Keg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang Pemerintahan	jumlah laporan cakin RKPD dan perubahan RKPD (analisis berdasarkan urusan)	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan pendampingan bidang pemerintahan untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
II.1.3	Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang pemerintahan	jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang pemerintahan	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang pemerintahan</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang pemerintahan untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang pemerintahan untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang pemerintahan untuk Reviu RPJMD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pemerintahan untuk Review Renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>jumlah laporan Pendampingan Penyusunan Dokumen Review/Perubahan Renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.1.4	Sub Keg Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pembangunan manusia yang tersedia	jumlah kajian untuk penyusunan dokumen RKPD,RPJMD,RPJPD (gambaran permasalahan dan Isu - isu strategis bidang)"bahan diperoleh dari desk review RPJMD,RKPD,RPJPD	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.1.5	Sub Keg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang pembangunan manusia	jumlah laporan cakin RKPd dan perubahan RKPd (analisis berdasarkan urusan)	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
	Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang pembangunan manusia</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang pembangunan manusia untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan pendampingan bidang pembangunan manusia untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.1.6	Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang Pembangunan Manusia	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang Pembangunan Manusia untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang Pembangunan Manusia untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang Pembangunan Manusia untuk Reviu RPJMD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang Pembangunan Manusia untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang Pembangunan Manusia untuk Review Renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Definisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Pendampingan Penyusunan Dokumen Review/Perubahan Rentra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase yang menunjukkan ketercukupan kebutuhan kajian strategis bidang perekonomian dan SDA untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD	jumlah kajian permasalahan dan isu strategis bidang perekonomian dan SDA yang dihasilkan	$\left(\frac{\sum \text{seluruh kajian bidang perekonomian dan SDA yang tersedia}}{\sum \text{seluruh kajian bidang perekonomian dan SDA yang dibutuhkan}} \times 100\% \right)$
			-kajian strategis meliputi kajian permasalahan dan isu strategis bidang perekonomian dan SDA -laporan capaian kinerja bidang perekonomian dan SDA -laporan hasil koordinasi tematik bidang perekonomian dan SDA	jumlah kajian bidang perekonomian dan SDA yang dibutuhkan dalam penyusunan dokrenbangda	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
II.2.1	Sub Keg Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan perekonomian yang tersedia	jumlah kajian untuk penyusunan dokumen RKPD,RPJMD,RPJPD (gambaran permasalahan dan Isu - isu strategis bidang)"bahan diperoleh dari desk review RPJMD,RKPD,RPJPD	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.2.2	Sub Keg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang perekonomian	jumlah laporan cakin RKPD dan perubahan RKPD (analisis berdasarkan urusan)	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang perekonomian</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang perekonomian untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan pendampingan bidang perekonomian untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.2.3	Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang perekonomian	jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang perekonomian	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang perekonomian</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang perekonomian untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang perekonomian untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang perekonomian untuk Reviu RPJMD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah Laporan FEDEP</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Roadmap Pengembangan Daya Saing</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.2.4	Sub Keg Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan SDA yang tersedia	jumlah kajian untuk penyusunan dokumen RKPD,RPJMD,RPJPD (gambaran permasalahan dan Isu - isu strategis bidang)"bahan diperoleh dari desk review RPJMD,RKPD,RPJPD	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.2.5	Sub Keg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang SDA	jumlah laporan cakin RKPd dan perubahan RKPd (analisis berdasarkan urusan)	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang SDA untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan pendampingan bidang SDA untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.2.6	Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang SDA	jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang SDA	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang SDA</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Reviu RPJMD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Renja</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan desk bidang SDA untuk Reviu Renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan pendampingan reviu renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Review Pengembangan Urban Farming</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Ruang Terbuka Hijau</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur	Persentase yang menunjukkan ketercukupan kebutuhan kajian strategis bidang	jumlah kajian permasalahan dan isu strategis bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dihasilkan	$\left(\frac{\sum \text{seluruh kajian bidang infrastruktur dan kewilayahanyang tersedia}}{\sum \text{seluruh kajian bidang infrastruktur dan kewilayahanyang dibutuhkan}} \times 100\% \right)$

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Definisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		dan Kewilayahan	infrastruktur dan kewilayahan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD -kajian strategis meliputi kajian permasalahan dan isu strategis bidang infrastruktur dan kewilayahan -laporan capaian kinerja bidang infrastruktur dan kewilayahan manusia -laporan hasil koordinasi tematik bidang infrastruktur dan kewilayahan	jumlah kajian bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dibutuhkan dalam penyusunan dokrenbangda	
II.3.1	Sub Keg Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Infrastruktur yang tersedia	jumlah kajian untuk penyusunan dokumen RKPD,RPJMD,RPJPD (gambaran permasalahan dan Isu - isu strategis bidang)"bahan diperoleh dari desk review RPJMD,RKPD,RPJPD	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk RKPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk RANTEKNO RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Rantekno RPJMD Pilkada serentak (RPJMD 2024-2029)</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk RPJPD 2025-2045</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Reviu RPJMD 2024-2029</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.3.2	Sub Keg Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil rencana pembangunan Bidang Infrastruktur	jumlah laporan cakin RKPD dan perubahan RKPD (analisis berdasarkan urusan)	seuai indikator	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan hasil desk bidang infrastruktur untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan pendampingan bidang infrastruktur untuk Reviu Renstra OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
II.3.3	Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang Infrastruktur	jumlah laporan yang dihasilkan dari koordinasi rencana pembangunan per tema pada bidang Infrastruktur	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan koordinasi harmonisasi perencanaan bidang infrastruktur</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk RKP</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Perubahan RKP dan Perubahan Renja OPD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Reviu RPJMD</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Renja</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah laporan desk bidang infrastruktur untuk Reviu Renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		<i>Jumlah laporan pendampingan reviu renstra</i>	<i>jumlah laporan</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan CBD Kawasan Shopping/Lembah Tidar</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pokja PKP</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
		<i>Jumlah dokumen SSK</i>	<i>jumlah dokumen</i>	<i>seuai indikator</i>	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan internal perangkat	tersedianya pelayanan internal perangkat daerah yang bermanfaat	dokumen perencanaan dan penganggaran BAPPEDA	$((\text{realisasi keg a} + \text{realisasi keg b} + \dots) / (\text{target keg a} + \text{target kegb} + \dots)) \times 100\%$

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
	KABUPATEN/KOTA	daerah yang berkualitas	bagi jalannya organisasi perangkat daerah	sarana dan prasarana	
III.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (%)	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$ Keterangan: CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1 $= (\text{realisasi output sub keg 1 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 1 tahun } x)$ Rumus CK2 $= (\text{realisasi output sub keg 2 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 2 tahun } x) \times 100\%$ dst
III.1.1	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renja/Renstra) (dokumen)	jumlah dokumen	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.1.2	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun (dokumen)	jumlah dokumen	seuai indikator	
III.1.3	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun (dokumen)	jumlah dokumen	seuai indikator	
III.1.4	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun (dokumen)	jumlah dokumen	seuai indikator	
III.1.5	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (dokumen)	jumlah dokumen	seuai indikator	
III.1.6	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (laporan)	<i>jumlah laporan</i>	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan (%)	tersedianya laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	<p>$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$</p> <p>Keterangan: CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n</p> <p>Rumus CK1 = (realisasi output sub keg 1 pada tahun x) / (target sub keg 1 tahun x)</p> <p>Rumus CK2 = (realisasi output sub keg 2 pada tahun x) / (target sub keg 2 tahun x) x 100% dst</p>
III.2.1	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya (orang)	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya (orang)	seuai indikator	
III.2.2	Sub Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang disusun	Jumlah Laporan	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.2.3	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun (dokumen)	Jumlah Laporan	seuai indikator	
III.2.4	Sub Keg Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun (dokumen)	Jumlah Laporan	seuai indikator	
III.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	kebutuhan logistik kantor	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$ Keterangan: CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1 $= (\text{realisasi output sub keg 1 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 1 tahun } x)$ Rumus CK2 $= (\text{realisasi output sub keg 2 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 2 tahun } x) \times 100\%$ dst

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinis Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.3.1	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya (ruang)	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya (ruang)	seuai indikator	
III.3.2	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic	Tersedianya bahan logistic	seuai indikator	
		Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis)	Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis)	seuai indikator	
		Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian (orang)	Jumlah pegawai yang disediakan makan minum harian (orang)	seuai indikator	
III.3.3	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	seuai indikator	
		jenis barang yang dicetak (jenis)	jenis barang yang dicetak (jenis)	seuai indikator	
		Jenis dokumen yang digandakan (jenis)	Jenis dokumen yang digandakan (jenis)	seuai indikator	
III.3.4	Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.3.5	Sub Keg Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan / material yang dibeli (item)	Jenis bahan / material yang dibeli (item)	seuai indikator	
III.3.6	Sub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kunjungan)	seuai indikator	
III.3.7	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	seuai indikator	
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (kali)	seuai indikator	
		Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kali)	Jumlah konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kali)	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	sarana dan prasarana kantor	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$ Keterangan: CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1 $= (\text{realisasi output sub keg 1 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 1 tahun } x)$ Rumus CK2 $= (\text{realisasi output sub keg 2 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 2 tahun } x) \times 100\%$ dst
III.4.1	Sub Keg Pengadaan Alat kantor	Jumlah Alat kantor yang dibeli	Jumlah Alat kantor yang dibeli	seuai indikator	
III.4.2	Sub Keg Pengadaan Alat kantor lainnya	Jumlah Alat kantor lainnya yang dibeli	Jumlah Alat kantor lainnya yang dibeli	seuai indikator	
III.4.3	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli (unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli (unit)	seuai indikator	
III.4.4	Sub Keg Pengadaan peralatan Personal Komputer	Jumlah peralatan personal Komputer yang dibeli	Jumlah peralatan personal Komputer yang dibeli	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.4.5	Sub Keg Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibeli	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibeli	seuai indikator	
III.4.6	Sub Keg Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Jumlah mebel yang dibeli	seuai indikator	
III.4.7	Sub Keg Pengadaan Alat rumah tangga Pembersih	Jumlah alat rumah tangga pembersih yang dibeli	Jumlah alat rumah tangga pembersih yang dibeli	seuai indikator	
III.4.8	Sub Keg Pengadaan Alat rumah tangga Dapur	Jumlah Alat rumah tangga Dapur yang dibeli	Jumlah Alat rumah tangga Dapur yang dibeli	seuai indikator	
III.4.9	Sub Keg Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Gorden)	Jumlah alat rumah tangga lainnya yang dibeli	Jumlah alat rumah tangga lainnya yang dibeli	seuai indikator	
III.4.1 0	Sub Keg Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat studio dan komunikasi yang dibeli	Jumlah Alat studio dan komunikasi yang dibeli	seuai indikator	
III.4.1 1	Sub Keg Pengadaan alat rumah tangga-pemadam kebakaran	Jumlah alat rumah tangga-pemadam kebakaran yang dibeli	Jumlah alat rumah tangga-pemadam kebakaran yang dibeli	seuai indikator	
III.4.1 2	Sub Keg Pengadaan Meja kerja pejabat	Jumlah Meja kerja pejabat yang dibeli	Jumlah Meja kerja pejabat yang dibeli	seuai indikator	
III.4.1 3	Sub Keg Pengadaan Kursi kerja pejabat	Jumlah Kursi kerja pejabat yang dibeli	Jumlah Kursi kerja pejabat yang dibeli	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.4.1 4	Sub Keg Pengadaan Alat studio cetak	Jumlah pengadaan Alat studio cetak yang dibeli	Jumlah pengadaan Alat studio cetak yang dibeli	seuai indikator	
III.4.1 5	Sub Keg Pengadaan alat komunikasi dan telepon	Jumlah alat komunikasi dan telepon yang dibeli	Jumlah alat komunikasi dan telepon yang dibeli	seuai indikator	
III.4.1 6	Sub Keg Pengadaan Alat keamanan (CCTV)	Jumlah Alat keamanan (CCTV) yang dibeli	Jumlah Alat keamanan (CCTV) yang dibeli	seuai indikator	
III.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah (%)	tersedianya Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	surat masuk, surat keluar, gaji pegawai	CK= (CK1+CK2+...+CKn)/n x100% Keterangan: CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1 =(realisasi output sub keg 1 pada tahun x)/(target sub keg 1 tahun x) Rumus CK2 =(realisasi output sub keg 2 pada tahun x)/(target sub keg 2 tahun x) x100% dst
III.5.1	Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat yang dikelola dan terkirim	Jenis surat yang dikelola dan terkirim	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		Jenis surat yang dikelola (jenis)	Jenis surat yang dikelola (jenis)	seuai indikator	
		Jumlah surat yang dikirim (surat)	Jumlah surat yang dikirim (surat)	seuai indikator	
III.5.2	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening)	Jumlah jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening)	seuai indikator	
III.5.3	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (orang)	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (dalam 1 tahun) (orang)	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
III.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	terpeliharanya barang milik daerah (CPBMD) penunjang pemerintahan daerah dalam kondisi baik	sarana dan prasarana kantor	$CK = (CK1 + CK2 + \dots + CKn) / n \times 100\%$ Keterangan: CK1,2, n= capaian kinerja indikator output sub kegiatan 1, sub kegiatan 2, dst sampai dengan n Rumus CK1 $= (\text{realisasi output sub keg 1 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 1 tahun } x)$ Rumus CK2 $= (\text{realisasi output sub keg 2 pada tahun } x) / (\text{target sub keg 2 tahun } x) \times 100\%$ dst
III.6.1	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Jumlah kendaraan yang terpelihara	seuai indikator	
		Jumlah STNK kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya (unit)	Jumlah STNK kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan pajaknya (unit)	seuai indikator	
		Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	seuai indikator	

No	PROGAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator	Difinisi Operasional	VARIABEL / KOMPONEN	RUMUS HITUNG
		yang terpelihara (unit)	(unit)		
III.6.2	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Jumlah kendaraan yang terpelihara	seuai indikator	
		Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (unit)	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya (unit)	seuai indikator	
		Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang terpelihara (unit)	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang terpelihara (unit)	seuai indikator	
III.6.3	Sub Keg Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara (unit)	Jumlah mebel yang terpelihara (unit)	seuai indikator	
III.6.4	Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara (jenis)	seuai indikator	
III.6.5	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi (unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara atau direhabilitasi (unit)	seuai indikator	

